



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



# HARHUBNAS 2022

BANGKIT MAJU BERSAMA

Melalui sinergi dan kolaborasi bersama antar insan perhubungan di seluruh Indonesia, maka segala tantangan akan lebih mudah untuk dihadapi.

*Bangkit Maju Bersama*  
*#MenghubungkanIndonesia*



NEWSLETTER

# infoHUBDAT

Berpikir Jernih Membangun Transportasi Darat

INFO KHUSUS

## Penjaga Konektivitas di Kepulauan Rempah



# HARHUBNAS 2022, BANGKIT MAJU BERSAMA



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



Skema Buy The Service atau BTS untuk angkutan massal perkotaan adalah mekanisme pembelian layanan angkutan massal oleh pemerintah

Pemerintah memberikan subsidi 100% terhadap biaya operasional penyelenggaraan angkutan sehingga tarif angkutan umum menjadi gratis



# KLINIK PRATAMA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Nomor ijin operasional:  
4/B.6/31.71.01.1004.03.024.K.1/3/-1.779.3/e/2022

Khusus pegawai  
di lingkungan  
Direktorat Jenderal  
Perhubungan Darat

## Jenis Pelayanan

- Poli umum
- Poli gigi
- Laboratorium
- Farmasi

## Waktu Operasional



Hari Senin s.d Jumat  
09:00 WIB s.d 14:30 WIB  
(Hari libur nasional tutup)

Jalan Tanah Abang II  
No. 5 RT 02 RW 03,  
Kel. Petojo Selatan,  
Kec. Gambir,  
Jakarta Pusat

## Pendaftaran

- Poli umum dan penunjang  
(laboratorium dan farmasi)  
Loket Pendaftaran Klinik  
Pratama Ditjen Hubdat
- Poli gigi  
Dengan perjanjian melalui  
nomor 082199959620

Assalamualaikum Wr.Wb.

Apa kabar pembaca setia *Newsletter* infoHUBDAT yang budiman? Kita berjumpa kembali dalam *Newsletter* infoHUBDAT sebagai media untuk bersilaturahmi dan berbagi informasi. Teriring salam hangat dan doa kepada pembaca sekalian semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya, dengan harapan dapat menjadi motivasi kita bersama dalam memberikan pelayanan jasa transportasi darat kepada masyarakat.

Pembaca yang budiman, ini adalah kali pertama saya menyapa para pembaca sekalian melalui media ini. Sejak dilantik oleh Menteri Perhubungan pada 30 Juni 2022 lalu, saya menjalankan tugas sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Sesuai arahan Menteri Perhubungan dan dengan dukungan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, mari kita penuhi target organisasi, serta mengawal keberhasilan program kerja, tidak saja di lingkup Kementerian Perhubungan tetapi juga mendukung Indonesia Maju sebagai visi misi Presiden.

Pada triwulan ketiga tahun 2022 ini, kita dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang cukup mengemuka di ranah publik, antara lain kenaikan BBM. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM ditempuh setelah melalui serangkaian pemikiran, pertimbangan, dan analisis yang matang. Sebagai dampaknya, mau tidak mau tarif transportasi juga ikut naik, tarif ojek online, tarif bus AKAP, tarif AKDP, tarif angkutan perkotaan, angkutan pedesaan dan juga tarif angkutan penyeberangan. Kenaikan tarif di sektor transportasi diharapkan tidak membebani masyarakat, namun juga tidak merugikan pelaku usaha. Oleh karena itu kecermatan perhitungan penyesuaian tarif angkutan umum sangat dibutuhkan sehingga besarnya dirasa adil, baik untuk operator, pelaku usaha maupun masyarakat pengguna transportasi umum.

Di sisi lain, kenaikan BBM ini, dapat menjadi momentum bagi kita, insan transportasi, untuk menata kembali angkutan umum. Meningkatkan kualitas angkutan umum, baik sarana, prasarana, mau pun pelayanannya, sehingga semakin banyak orang tertarik menggunakan angkutan umum. Terutama di perkotaan, masyarakat yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi tentu sangat terdampak dengan kenaikan BBM. Mari ajak masyarakat yang selama ini menggunakan angkutan pribadi untuk beralih menggunakan angkutan umum.

Akhir kata, saya sampaikan imbauan untuk selalu menjaga kebersihan dan menerapkan protokol kesehatan, baik diri pribadi maupun lingkungan sekitar. Bagi rekan-rekan yang harus bertugas di lapangan, saya sampaikan apresiasi dan terimakasih. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa eksistensi kita berguna bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara tercinta. Tetap semangat dan tetap sehat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**DRS. HENDRO SUGIATNO, M.M.**





**Foto Cover:**

**HMS DJPD/CAS**

KMP. Sardinela sedang bersandar dan melakukan proses bongkar muat di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua, Ambon, Maluku, 20/9/2022. Kapal Penyeberangan yang dikelola PD. Pancakarya ini melayani rute Ambon (PP. Hunimua) - Pulau Seram (PP. Waipirit).

**PENANGGUNG JAWAB**  
Amirulloh

**REDAKTUR PELAKSANA**  
Endy Irawan

**REDAKTUR UTAMA**  
Pitra Setiawan  
Nanang Rahardjo  
Aznal

**REDAKTUR**  
Ardian Sukmaji  
Dinda Siahaan  
Alvia Lilian  
Hanna Suryadika

**DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAFI**  
M. Aulia Dharna  
Herman Wibowo  
Bayu Adi Saputro  
Rinjani Pangestu

**SEKRETARIAT**  
Bejo Sri Wahono  
Ratna Syaka Aprilda  
Bambang Widianto  
Sari Hayu Hutami  
Ely Rusnita  
Yudha Kurniawan  
Kurniadi Zaini  
Didik Prasetyo  
Rifai Dyan Armananta  
Nolita  
Rusdinal  
M. Farid Ardiansyah  
M. Fadil Imaddudin  
Achmad Maulana  
Achmad Nanang  
Rosmala Damayanti  
Nova Yulianasari Sopiah  
Reza Saputra  
Nurfadilah Sinta Ningrum  
Ade Yunita  
Ardianto  
Rina Noviana  
Septriana Dia Areta

**KONTRIBUTOR**  
Junedi Sembiring  
Nurita Aprilianing Tyas  
Marisa  
Wahyu Arya Putra  
Prisca Magdalena Samosir  
Arief Eko Sumba  
Cristian Andri Mardhani  
Erlieka Affan  
Ririn Scorviyanti  
Rinto Mahendra Raharjo



**Diterbitkan oleh:**

Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat  
Gedung Karya Lantai 12  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8

Jakarta Pusat 10110  
Telp./Fax. : (021) 3506141

email : [humas.hubdat@gmail.com](mailto:humas.hubdat@gmail.com)

website : <http://hubdat.dephub.go.id/>

@hubdat151

ditjen perhubungan darat

@ditjen\_hubdat

ditjen perhubungan darat

# Info Redaksi

Pembaca *Newsletter* infoHUBDAT yang budiman,

Seiring dengan situasi pandemi yang berangsur membaik, pemerintah membuat kebijakan membolehkan masyarakat untuk dapat melakukan perjalanan dengan persyaratan, bagi yang telah mendapatkan vaksin booster, tidak perlu lagi melakukan tes antigen atau PCR, namun tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Para pembaca yang budiman, pada edisi kali ini, *Newsletter* infoHUBDAT menyuguhkan Laporan Utama mengenai pesan Menteri Perhubungan pada Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2022. Menteri Perhubungan mendorong sektor transportasi untuk bangkit lebih cepat setelah dua tahun terdampak pandemi Covid-19.

Kemudian, kami sajikan pula liputan khusus mengenai kondisi sarana dan prasarana di wilayah kerja BPTD XXIII Maluku, termasuk angkutan penyeberangan perintis dan angkutan jalan perintis. Provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan, angkutan penyeberangan menjadi penyangga utama konektivitas antar pulau, baik untuk mengangkut penumpang maupun logistik.

Tak kalah menarik, artikel mengenai Angkot Feeder untuk penumpang LRT Palembang. Disusul kemudian, sebuah tulisan dari pengamat transportasi yang berisi seruan bagi semua pihak untuk memprioritaskan angkutan umum. Perlunya dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan program *buy the service* yang sudah berjalan di sejumlah kota di Indonesia.

Kami tampilkan pula laporan kegiatan Menteri Perhubungan, Menko Polhukam, dan Menteri Luar Negeri mengampangkan keselamatan jalan yang dikemas dalam acara *Safety Riding* di area Kampus UGM Yogyakarta. Masih bertema sarana transportasi jalan, kami suguhkan artikel mengenai Peluang Swasta Kelola Uji Berkala Kendaraan Bermotor serta Progres Pembangunan Bus Listrik untuk Perhelatan KTT G20.

Selain itu, ada pula ulasan mengenai Integrasi Antar Moda di Terminal Klaten dan Revitalisasi Terminal Tingkir Salatiga yang turut melengkapi edisi kali ini.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pun telah kami himpun dan kami sajikan kepada pembaca sekalian dalam infoSelintas. Di bagian akhir, kami sajikan rekaman gambar peristiwa dan kegiatan unit kerja terkait melalui bidikan lensa. Semoga apa yang kami sajikan ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan para pembaca sekalian.\*



Di wilayah kepulauan, angkutan penyeberangan dengan kapal penyeberangan menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat dari pulau yang satu ke pulau yang lain. KMP. Sardinela sedang bersandar dan melakukan proses bongkar muat di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua, Ambon, Maluku, 21/9/2022. Foto: HMS DJPD/CAS

## daftar isi EDISI TRIWULAN 03 / 2022

### Info Utama

## 04 HARHUBNAS 2022 BANGKIT MAJU BERSAMA

Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tahun 2022 mengambil tema Bangkit Maju Bersama. Artinya, melalui sinergi dan kolaborasi bersama antar insan perhubungan di seluruh Indonesia, maka segala tantangan akan lebih mudah untuk dihadapi.

### Info Khusus

- 06 BPTD XXIII Maluku, Penjaga Konektivitas di Kepulauan Rempah
- 10 Angkutan Penyeberangan Perintis Rajut Konektivitas Masyarakat Maluku
- 13 Angkutan Jalan Perintis Layani Daerah Terpencil

### Info Angkutan

- 16 Angkot Feeder New Oplet Musi Emas
- 18 Prioritaskan Transportasi Umum

### Info Lalu Lintas

- 22 PPNS LLAJ Tingkatkan Pengawasan dan Gakkum

### Info Sarana

- 24 Upaya Tindak Lanjut Cegah Rem Blong
- 26 Tiga Menteri Kampanyekan Keselamatan Jalan
- 28 Peluang Swasta Kelola Uji Kir
- 30 Progres Bus Listrik Untuk G20

### Info Prasarana

- 32 Integrasi Antar Moda di Terminal Klaten
- 34 Revitalisasi Terminal Tingkir Salatiga Jadi Pusat Kegiatan Masyarakat
- 36 Konsep *Mixed Use* Optimalikan Fungsi Terminal Bus Tipe A

### Info TSDP

- 35 Ditjen Hubdat - PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Sepakati Kerja Sama Pemanfaatan Pelabuhan Ajibata dan Ambarita

### Info Kesehatan

- 36 Kisah Pengabdian Profesi Dokter Gigi ASN Ditjen Hubdat

### Info Selintas

- 39 Sosialisasi Andalalin dan Pengawasan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Makassar
- ASDP Gandeng Pelindo dan Pelni Demi Tingkatkan Layanan Penyeberangan
- Kemenhub Tanggapi Kecelakaan Truk BBM di Cibubur
- Tinjau Kesiapan Operasional Pelabuhan di Bali, Dirjen Hubdat Sambangi Bias Munjul dan Sampalan
- Ditjen Hubdat-Polda Bali Koordinasikan Persiapan Jelang KTT G 20
- Sambut Peserta Jamnas XI 2022, Ditjen Hubdat Sosialisasikan Keselamatan Jalan di Kalangan Pelajar
- Kunjungan Kerja Dirjen Hubdat Ke Yogyakarta

### Lensa Hubdat

- 41 Rekaman Berbagai Peristiwa yang Terjadi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Melalui Bidikan Lensa

# HARHUBNAS 2022 MENHUB DORONG SEKTOR TRANSPORTASI BANGKIT LEBIH CEPAT

Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tahun 2022 mengambil tema Bangkit Maju Bersama. Artinya, melalui sinergi dan kolaborasi bersama antar insan perhubungan di seluruh Indonesia, maka segala tantangan akan lebih mudah untuk dihadapi.

**M**enteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong sektor transportasi untuk bangkit lebih cepat setelah dua tahun terdampak pandemi Covid-19.

Menhub mengatakan, peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tahun 2022 mengambil tema Bangkit Maju Bersama. Artinya, melalui sinergi dan kolaborasi bersama antar insan perhubungan di seluruh Indonesia, maka segala tantangan akan lebih mudah untuk dihadapi.

“Kita tidak akan bangkit lebih cepat kalau tidak bersama-sama,” ujar Menhub saat memimpin upacara peringatan Harhubnas tahun 2022 yang digelar di Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (17/9).

Menhub menjelaskan, sektor transportasi sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Namun saat ini, upaya pemulihan sektor transportasi sudah menunjukkan hasil positif.

Beberapa capaian positif hingga September 2022 ini, diantaranya



Menteri Perhubungan menyampaikan sambutan pada Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2022 di Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan, 17/9/2022. Foto: HMS DJPD/BYU

yakni: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor transportasi mampu tumbuh 21,27% di kuartal kedua tahun 2022 dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,44%.

Selanjutnya, pengelolaan kembali ruang udara di atas Kepulauan

Riau dan Natuna kepada NKRI menjadi suatu langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia.

“Pencapaian ini harus kita syukuri bahwa di tengah tantangan yang dihadapi, sektor transportasi dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi Indonesia,” ucap Menhub.



Menhub mengungkapkan ke depan masih ada sejumlah pekerjaan rumah di sektor transportasi yang harus dituntaskan, seperti misalnya: peningkatan konektivitas, keselamatan transportasi, dan integrasi antarmoda di seluruh Indonesia.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Upacara Peringatan Harhubnas yang biasanya di gelar di Ibu Kota Jakarta, pada tahun ini dilaksanakan di Kota Palembang. Hal ini menjadi perwujudan paradigma pembangunan yang dilakukan tidak hanya berfokus di pulau Jawa (Jawa Sentris) tetapi Indonesia Sentris.

Selain itu, Kota Palembang dinilai menjadi contoh daerah di luar Jawa, yang telah memiliki angkutan massal yang lengkap dan terintegrasi antara LRT, BRT Trans Musi, angkot feeder dan angkutan lainnya.



Usai melakukan upacara, Menhub bersama Gubernur Sumsel Herman Deru dan Walikota Palembang H. Harnojojo menuju Stasiun LRT Ampera, untuk membagikan kartu elektronik LRT Sumsel secara gratis kepada para penyandang disabilitas. Hal ini merupakan komitmen dari Kemenhub untuk menyediakan angkutan massal yang inklusif bagi semua kalangan

masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti: Ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Turut hadir dalam kegiatan ini, anggota DPR dan DPRD RI, jajaran Kemenhub, Dinas Perhubungan Provinsi dan Kota, operator transportasi, dan stakeholder terkait lainnya.\*

# BPTD XXIII MALUKU Penjaga Konektivitas di Kepulauan Rempah

Oleh: Tim Liputan infoHUBDAT

**Saat menginjakkan kaki di provinsi ini, pikiran kita serasa langsung dibawa mengenang masa penjajahan dulu. Di mana Portugis, Spanyol hingga Belanda datang dan ingin menguasai rempah-rempah terbaik dari satu pulau ke pulau yang lainnya di daerah yang juga dikenal dengan Maloko Kie Raha ini.**

**M**aluku, provinsi kepulauan ini memiliki karakteristik geografis yang unik. Setidaknya daerah yang punya total panjang garis pantai 10.662 Km, dan 1.340 pulau ini

sangat memerlukan konektivitas transportasi yang lengkap, mulai darat, laut dan udara agar bisa menjangkau daerah-daerah pelosok kepulauan tersebut. Melihat hal tersebut, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemhub) telah mengamanahkan kepada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wil XXIII Provinsi Maluku untuk memberikan layanan yang aman, nyaman dan terjangkau kepada masyarakat.

Provinsi kepulauan yang terdiri dari sembilan Kabupaten dan dua Kota ini memiliki luas wilayah keseluruhan 712.480 Km<sup>2</sup> luas terdiri dari daratan 54.185 Km<sup>2</sup> (7,6%) dan luas Lautan 658.294,69 (92,4%) Km<sup>2</sup>. Dengan karakteristik wilayah kepulauan maka BPTD Wilayah XXIII masuk dalam Tipe C yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan LLAJ dan LLASDP serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial.

Saat ditemui di kantornya, Kepala BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku,

Handa Lesmana menjelaskan bahwa BPTD yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya ini cukup unik karena memiliki 29 pelabuhan yang aktif dan lima dalam proses konstruksi. Dengan balai tipe C maka mayoritas wilayah kerjanya merupakan perairan, sehingga moda yang diutamakan transportasi penyeberangan antar pulau. Sedangkan untuk transportasi jalan hanya berupa bus antar kota dalam provinsi.

Lingkup Kerja BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku mencakup :

- Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yaitu UPPKB Passo
- Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan yaitu :
  - Satuan Pelayanan PP. Hunimua - Waipirit;
  - Satuan Pelayanan PP. Galala - Namlea.
  - Usulan Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan (Surat Kepala BPTD Wil. XXIII Prov. Maluku Nomor : AP.005/2/20/BPTD), antara lain :
    1. Satuan Pelayanan PP Waai;
    2. Satuan Pelayanan PP. Amahai;
    3. Satuan Pelayanan PP. Wahai;
    4. Satuan Pelayanan PP. Teluk Bara;
    5. Satuan Pelayanan PP. Tual;
    6. Satuan Pelayanan PP. Dobo;
    7. Satuan Pelayanan PP. Saumlaki.
  - Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Nasional (1.771, 67 km).

“BPTD wilayah kami memberikan pelayanan perintis kepada masyarakat untuk moda bus dan kapal penyeberangan. Untuk bus dilayani oleh Perum Damri dan untuk penyeberangan dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan enam kapal yang mendapatkan subsidi yang tersebar cukup merata ke pulau-pulau di Maluku dan sekitarnya,” kata Handa.



Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Maluku, Handa Lesmana

Kapal penyeberangan yang mendapatkan subsidi adalah KMP Badaleon dari perusahaan PD. Panca Karya untuk lintasan Namlea - Teluk Bara - Sanana, KMP Tatihi dari perusahaan PD. Panca Karya untuk lintasan Wahai - Waigama - Sorong, KMP Tanjung Sole dari perusahaan PD. Panca Karya untuk lintasan Namlea - Manipa - Buano - Waisala, KMP Egron dari perusahaan Kalwedo Kidabela untuk lintasan Saumlaki - Seira - Wunlah - Larat - Yaru - Momar, KMP Tanjung Kabat perusahaan dari PT. Bipolo Gidin lintasan Galala - Ambalau - Wamsisi - Namrole - Leksula - Tifu - Nanali, dan KMP Lorry Amar dari perusahaan PD. Panca Karya untuk lintasan Tual - Teor - Kesui - Gorom - Geser - Air Nanang - Ambon.

Sedangkan untuk angkutan bus perintis ada lima trayek yang dioperasikan DAMRI di kawasan Ambon. Beberapa trayek yang dilayani DAMRI antara lain trayek ke Tutuk Tolu, Alune, Warasiwa, Laimu, Katapang, Pasanea, dan Namto. Dengan rute Ambon - Tutuk Tulo, Ambon - Alune, Ambon - Warasiwa, Ambon - Laimu, Ambon - Katapang, Ambon - Panasea, dan Ambon - Namto.

“Subsidi operasional perintis pada tahun 2022 ini meliputi angkutan jalan 18 trayek. Terdiri dari Ambon - Pulau Seram 7 trayek, Pulau

Buru 5 trayek, Kabupaten Maluku Tenggara 1 trayek, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar 5 trayek. Untuk angkutan penyeberangan tahun 2022 ini ada 58 trayek dimana 52 trayek dalam provinsi dan 6 trayek antar provinsi,” tambah Handa.

Terkait tingkat keterisian penumpang angkutan jalan perintis, dari data yang diperoleh sekitar 40 persen, namun jumlah tersebut disebabkan sebagian tempat duduk penumpang diisi oleh barang bawaan penumpang. Sehingga jika dilihat di lapangan, bus yang ada terisi penuh. Sedangkan tingkat keterisian untuk kapal penyeberangan antar pulau cukup lumayan di beberapa trayek, terutama yang jauh seperti dari pulau Ambon ke Tual sekitar 70 hingga 80 persen. Sedangkan untuk jarak pendek jumlahnya berada di bawah itu. Namun untuk peminatnya cukup tinggi bagi masyarakat yang menggunakan layanan ini.

“Ke depannya kita akan mengusulkan lebih banyak lagi lintasan kapal penyeberangan. Berbeda dengan DAMRI yang dari evaluasi kita seperti sudah cukup, sehingga kami akan mencoba fokus dan menambah kepada layanan perintis kapal penyeberangan pada tahun depan. Hal ini disebabkan daerah kami merupakan wilayah kepulauan,” kata Handa.





Bus DAMRI Rute Ambon - Laimu sedang melintas di Jalan Trans Seram, Pulau Seram, Maluku, 21/9/2022. Foto: HMS DJPD/CAS. Melalui subsidi angkutan jalan perintis di kawasan terpencil, pemerintah memberikan pelayanan jasa transportasi kepada masyarakat. Perum DAMRI Cabang Ambon melayani beberapa rute antara lain trayek dari Ambon ke Tutuk Tolu, Alune, Warasiwa, Laimu, Katapang, Pasanea, dan Namto.

Untuk angkutan logistik saat ini berpusat dan transit di Pulau Ambon. Di mana ini merupakan lanjutan pengiriman dari daerah sebelumnya seperti pulau Jawa ataupun Makassar yang pendistribusiannya diteruskan ke Pulau Buru dan Pulau Seram, sebelumnya diangkut oleh kapal laut lalu diturunkan ke truk kemudian dikirim ke daerah tujuan menggunakan kapal penyeberangan.

Handa menyampaikan alasan pihaknya akan menambah dan mengoptimalkan kapal penyeberangan yaitu karena penghubung antar pulau, baik itu angkutan penumpang maupun logistik sangat membutuhkan moda tersebut. Dengan penambahan rute dan trayek penyeberangan maka pelayanan akan semakin banyak dan juga distribusi logistik akan lebih merata daerah pelosok.

Bahkan hasil evaluasi dari BPTD Wilayah XXIII banyak masyarakat pengguna jasa yang merasakan manfaat dari angkutan penyeberangan, terlebih lagi angkutan penyeberangan perintis yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah. Sebagai contoh lintasan penyeberangan dari Pulau Ambon ke Pulau Seram yang ditingkatkan dari Pelabuhan Penyeberangan Hunimua berpasangan dengan Pelabuhan Penyeberangan Waipirit. Dalam sehari, dua pelabuhan ini memberikan lebih dari lima kali pelayanan penyeberangan dengan menggunakan empat kapal.

“Penyeberangan pada lintasan ini dapat dikatakan sebagai jembatan utama yang menghubungkan kedua pulau di Maluku. Biasanya angkutan logistik dari Pulau Ambon ke Pulau Seram membawa sembako dan bahan bangunan

sedangkan sebaliknya membawa buah-buahan, dan hasil laut,” kata Handa.

Menjelaskan tugas dan tanggungjawabnya, Handa mengatakan, BPTD Wilayah XXIII menyebar pegawainya ke berbagai penjuru Maluku. Jumlah pegawai sebanyak 185 orang, terdiri dari 55 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 130 orang Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNPN). Untuk di kantor pusat yang ada di Ambon terdapat pegawai sebanyak 72 orang dan sisanya sebanyak 113 orang tersebar ke 33 titik pelabuhan penyeberangan.

Untuk jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) itu sendiri sebenarnya sudah cukup, namun karena Maluku merupakan daerah kepulauan dengan 29 pelabuhan penyeberangan di wilayah kerja BPTD XXIII Maluku, jadi pihaknya



KMP Layur sedang bersandar dan melakukan proses bongkar muat di Pelabuhan Penyeberangan Wailey di Pulau Seram, Maluku. 21/9/2022. KMP Layur melayani angkutan penyeberangan perintis dengan rute Pulau Seram (PP. Wailey) - Pulau Saparua (PP. Umeputih). Foto: HMS DJPD/WBW

masih membutuhkan beberapa SDM dengan kompetensi yang spesifik yaitu memiliki sertifikat kesyahbandaran. Hal ini diperlukan karena sebagai syarat seorang petugas dapat menerbitkan Surat Persetujuan Belayar (SPB) salah satunya adalah harus memiliki sertifikat kesyahbandaran.

“Dan untuk ini kami juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pehubungan Laut untuk memberikan bantuan beberapa pelabuhan penyeberangan merekalah yang mengeluarkan SPB sedangkan beberapa pelabuhan penyeberangan utama kami yang mengeluarkan izinnya,” kata Handa.

Terkait pengawasan dalam rangka mewujudkan keselamatan jalan ataupun penyeberangan, BPTD Wilayah XXIII memiliki satu Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang beroperasi cukup baik. Namun jika dibandingkan Pulau Jawa ataupun daerah lain, jumlah kendaraan yang diawasi tidak terlalu banyak bahkan untuk ODOL sendiri masih dalam batas toleransi yaitu sekitar 20 persen, di mana batasan paling tinggi sekitar 30 persen yang harus lakukan penindakan. Pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran batas muatan (*overload*) dan pelanggaran tata cara muat barang. Sementara untuk

pelanggaran *over* dimensi sangat jarang terjadi.

“Secara teknologi kami telah menggunakan sistem Jembatan Timbang Online, sehingga untuk pelaporan dari unit kami ke pusat cukup lancar. Dan jika temukan ada kelebihan muatan kita meminta pengemudi untuk melakukan transfer muatan. Setelah transfer muatan dilakukan baru kita berikan struk untuk dapat melakukan penyeberangan, jika tidak petugas kita di pelabuhan penyeberangan tidak akan mengizinkan karena hal tersebut dapat membahayakan keselamatan pelayaran,” katanya.

Handa juga menegaskan bahwa pihaknya melakukan pengawasan secara ketat kepada truk yang akan melakukan penyeberangan dengan menggunakan moda kapal. Untuk itu setiap truk yang akan menyeberang wajib melalui jembatan timbang, jika muatan sesuai ketentuan yang ada serta tidak berlebihan maka ada diberikan surat keterangan laik jalan. Namun apabila kendaraan tidak memiliki surat keterangan laik jalan maka tidak akan diizinkan menggunakan jasa angkutan penyeberangan dan petugas akan meminta pengemudi untuk kembali ke jembatan timbang. (\*)



Petugas sedang mengarahkan kendaraan untuk ditimbang pada platform penimbangan kendaraan bermotor di UPPKB Passo, Ambon, Maluku, 20 September 2022. Foto: HMS DJPD/WBW

Sebagai daerah kepulauan, angkutan penyeberangan yang menggunakan kapal menjadi tulang punggung untuk pergerakan masyarakat dari satu pulau ke pulau lain di daerah Maluku. Pergerakan dengan kapal penyeberangan ini tidak hanya membawa penumpang, namun dilakukan untuk pengiriman logistik seperti membawa hasil laut, sembako, bahan bangunan dan lainnya.

Untuk hal ini, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Maluku dan Tual siap melayani perjalanan masyarakat yang ingin melakukan penyeberangan antar pulau di Maluku. Terkait hal ini, BUMN di bidang transportasi penyeberangan ini telah menyiapkan delapan kapal untuk Cabang Ambon dan Cabang Tual. Di Ambon jangkauan pelayanan ASDP cukup luas, mulai dari Seram hingga Namlea. Dengan jarak terjauh pada layanan komersial adalah Ambon ke Namlea yaitu berangkat malam pukul 19.30 WIT sampai ditujuan pukul 07.00 WIT. Sedangkan pada layanan perintis adalah Keyeli ke Namlea.



Dalam perbincangannya, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Maluku dan Tual, Anton Mudianto menjelaskan bahwa untuk Cabang Ambon ada lima trayek komersial dan tiga trayek perintis. Untuk lintas komersialnya yaitu Galala - Umimo - Waipirit dengan tiga kapal dan Galala - Namlea dengan dua kapal. Untuk yang di Perintis lintasnya Umeputih - Nalahia, Nalahia - Amahai dan Umeputih - Wailey dengan tiga kapal. Terkait trayek perintis ada perkembangan yang cukup baik, terlebih lagi pasca pandemi Covid-19, terutama untuk angkutan logistik yang mengangkut bahan-bahan pokok dari Kota Ambon ke daerah. Untuk penumpang dari data yang ada sudah ada kenaikan penumpang sekitar 25%,

## ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS RAJUT KONEKTIVITAS MASYARAKAT MALUKU

salah satunya pada trayek dari dan ke Wailey.

“Kami melihat dengan adanya rute perintis ini sangat membantu masyarakat dalam bertransportasi.

Sebab kita ketahui bersama bahwa Maluku adalah daerah kepulauan sehingga diperlukan sarana penyeberangan agar dapat mempermudah masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin

membeli bahan pokok seperti beras dan sembako untuk dijual kembali di daerahnya. Contoh lintasan perintis yang cukup ramai adalah Umeputih - Wailey yang dilayani oleh KMP Layur,” katanya.

Anton juga menceritakan bahwa untuk tahun 2022 ini, dari Januari hingga September pihaknya telah menerima subsidi. Dengan rincian untuk KMP Samandar pada trayek Umeputih - Nalahia, Nalahia - Amahai sebesar Rp 3.249 Miliar. Lalu untuk KMP Layur Rp 1.479 Miliar dengan trayek Umeputih - Wailey. Dan yang terakhir KMP Danau Rana pada lintasan Namlea - Keyeli sebesar Rp.2.354 Miliar. Di mana subsidi tersebut selain digunakan untuk tarif penumpang juga digunakan untuk subsidi

operasional seperti gaji pegawai, BBM, serta uang makan pegawai dan ada juga subsidi *docking*. Untuk memberikan kesempatan bagi pihak lain beroperasi, sekaligus agar masyarakat memilih dalam menggunakan operator yang diinginkan, di Ambon ada beberapa perusahaan penyeberangan yang melayani. Selain ASDP ada juga PD. Panca Karya, perusahaan daerah yang mengoperasikan

KMP Bahtera Nusantara. Lalu ada juga operator kapal penyeberangan dari perusahaan swasta, antara lain PT. Bipolo Gidin, PT. Kalwedo Kidabela, PT. Pelayaran Dharma Indah, PT. Multi Guna Maritim, PT. Dharma Dwipa Utama, dan PT. Flobamor.

Menurut Anton dalam rangka meningkatkan pelayanan agar lebih cepat dan mudah, dan sesuai arahan dari kantor pusat

**Provinsi Maluku adalah daerah kepulauan sehingga diperlukan sarana penyeberangan agar dapat mempermudah masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin membeli bahan pokok seperti beras dan sembako untuk dijual kembali di daerahnya.**



KMP Layur sedang bersandar dan melakukan proses bongkar muat di Pelabuhan Penyeberangan Umeputih di Pulau Saparua, Maluku. 21/9/2022. KMP Layur melayani angkutan penyeberangan perintis dengan rute Pulau Seram (PP. Wailey) - Pulau Saparua (PP. Umeputih). Foto: HMS DJPD/WBWW



Masyarakat pengguna jasa penyeberangan sedang menaiki KMP Layur di Pelabuhan Penyeberangan Wailey di Pulau Seram, Maluku. 21/9/2022. KMP Layur melayani angkutan penyeberangan perintis dengan rute Pulau Seram (PP. Wailey) - Pulau Saparua (PP. Umeputih). Foto: HMS DJPD/WBW

PT. ASDP Indonesia Ferry maka pihaknya berencana melakukan layanan *cashless* pada beberapa lintasan dan pelabuhan yang dikelolanya. Pada akhir tahun ini seperti di Galala dan Umimo diharapkan program ini dapat berjalan, dan saat ini pihaknya tengah melakukan persiapan peralatan dan juga perizinan. Untuk program *cashless* ini pihaknya berkerjasama dengan sejumlah perbankan yaitu BNI, Bank Mandiri, BCA, BRI, dan Bank Maluku Utara.

Pada kesempatan terpisah, Capt. Susanto Nahkoda KMP. Layur yang merupakan kapal dari PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Maluku mengatakan bahwa KMP. Layur ini setiap harinya melayani rute dari Pelabuhan Umeputih di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah menuju Pelabuhan Wailey di Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Dan untuk waktunya dari Wailey di trip pertama berangkat jam 09.00 WIT tiba di Umiputih jam 10.00 WIT. Setibanya di pelabuhan tujuan langsung dilakukan bongkar muat.

“Terkait tingkat keterisian, untuk penumpang memang ramai pada momen tertentu saja. Seperti akhir pekan,

hari libur dan juga pada liburan sekolah. Namun untuk setiap harinya tergolong sepi. Hanya ada belasan penumpang dan beberapa kendaraan, tidak seperti waktu-waktu tertentu di mana penumpang sangat ramai bahkan ada yang harus menunggu kedatangan kapal berikutnya,” katanya.

Capt. Susanto juga melihat dengan adanya rute perintis ini sangat membantu masyarakat. Dengan harga yang terjangkau masyarakat dapat melakukan aktivitas dan perjalanan dengan waktu yang terbilang cukup cepat jika dibandingkan perjalanan sebelumnya yang memakan waktu cukup lama.

“Kami melihat bahwa rute Saparua-Seram ini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Para pedagang dari Pulau Seram membawa sayuran, sembako dan buah-buahan untuk dijual kepada masyarakat di Pulau Saparua,” katanya.

Tarifnya juga sangat terjangkau, kata Capt. Susanto, untuk penumpang rute Saparua-Seram sebesar Rp 7500,-, untuk tarif sepeda motor

Rp 9.000,-, untuk mobil kecil Rp 80.000 lalu untuk truk itu sebesar Rp 127.000,-. Prediksi peningkatan penumpang dalam waktu terdekat adalah menjelang perayaan Natal dan Tahun baru.

Pada kesempatan terpisah, masyarakat Maluku mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan kapal perintis ini. Subsidi dari Pemerintah membuat mereka dapat melakukan aktivitas perjalanan dan ekonomi dengan harga yang terjangkau. Hal ini diungkapkan oleh Icha (35 tahun), warga Pulau Seram Maluku yang berprofesi sebagai pedagang.

Menurutnya kehadiran transportasi penyeberangan antar pulau yang dilayani oleh KMP Layur ini sangat membantu masyarakat, khususnya dalam hal konektivitas dan juga aktivitas perekonomian. Sehingga memberikan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau Seram, Maluku.

“Saya berharap ke depannya KMP Layur terus dapat melayani masyarakat. Sebab hal ini sangat membantu kami, seperti saya yang biasa berjualan ke Ambon dari Seram. Dengan adanya transportasi sangat membantu kami,” pungkasnya.(\*)



Bus DAMRI Rute Ambon - Laimu sedang melintas di Jalan Trans Seram, Pulau Seram, Maluku, 21/9/2022. Foto: HMS DJPD/CAS.

# ANGKUTAN JALAN PERINTIS LAYANI DAERAH TERPENCIL

Tidak kalah penting dengan angkutan penyeberangan, angkutan jalan perintis juga sangat dibutuhkan dan dinantikan kehadirannya oleh masyarakat Maluku. Sebab dengan adanya layanan yang diberikan oleh Perum DAMRI maka daerah terpencil dan pelosok menjadi dapat diakses.

Dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat, Perum DAMRI Cabang Ambon memiliki 18 trayek yang tersebar di tujuh Kabupaten dan satu kota di Maluku. Dan untuk armada sebanyak 26 armada dengan 54 orang pengemudi. Dari trayek tersebut ada satu yang terjauh

yaitu dengan jarak tempuh 593 KM dan waktunya selama empat hari perjalanan dengan biaya per orang sebesar Rp 280.000,-.

Dijelaskan oleh Manager Usaha Perum DAMRI Cabang Ambon, Samuel Joris bahwa dari trayek tersebut sebagian besarnya adalah rute perintis yang merupakan subsidi dari Kementerian Perhubungan (Kemenuh).

“Ini semua merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat di pelosok

daerah yang memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi. Diharapkan dengan adanya layanan ini dapat membantu masyarakat menjadi tidak susah saat melakukan mobilitas dari daerah ke kota atau sebaliknya sehingga dapat melakukan aktivitas bisnis atau perjalanan lainnya,” katanya.

Samuel juga menjelaskan bahwa salah satu layanan transportasi perintis yang membuka akses di suatu wilayah sehingga dapat memudahkan perjalanan masyarakat adalah pada trayek Ambon - Tutulolu. Dulu, Di rute ini, sebelum ada layanan jalan perintis DAMRI, jika masyarakat ingin berpergian ataupun menjual hasil alamnya ke kota Ambon itu harus menggunakan transportasi laut dengan waktu tempuh tiga sampai empat hari, belum lagi jika terjadi gangguan cuaca bisa mundur hingga beberapa hari.

“Bersyukur dengan ada layanan perintis DAMRI rute Ambon - Tutulolu aktivitas masyarakat bisa lebih cepat yaitu satu hingga dua hari. Dengan ini masyarakat yang ingin mengirim barangnya ke Ambon berupa bahan makanan pokok baik untuk dijual

atau untuk anak mereka yang menempuh pendidikan di Ambon bisa lebih cepat,” katanya.

Pada kesempatan terpisah, salah seorang pengemudi DAMRI, Augel Assel menjelaskan untuk rute yang sering digunakan oleh masyarakat adalah rute Ambon - Warasiwa dengan waktu pemberangkatan jam 07.00 WIT dan sampai tujuan jam 17.00 WIT dengan jarak tempuh sekitar 250 km. Rata-rata jumlah penumpang penuh setiap harinya pada hari Senin dengan tujuan untuk sekolah dan berjualan.

“Dengan adanya rute ini dapat membantu masyarakat. Tidak hanya melakukan perjalanan, namun juga meningkatkan perekonomiannya. Mereka bisa berjualan barang-barang yang biasa dibeli di kota,” katanya.

Assel juga menjelaskan dalam menjalankan tugasnya tersebut ada suka duka yang dialami saat membawa penumpang, di antaranya sering mendapatkan kendala yaitu bus yang digunakan mogok di jalan akibat kerusakan mesin. Dirinya bersyukur kejadian tersebut pada siang hari dan penumpang dapat menerima hal itu.

Assel berharap agar hal ini mendapatkan perhatian dari pemerintah dan perusahaan sehingga bisa memberikan bus yang lebih baik dan layak, bahkan jika memungkinkan armada yang baru agar pelayanan bagi masyarakat di pelosok daerah dapat dilakukan dengan lebih baik.

Sedangkan Silaseike (52 tahun), pedagang yang juga berprofesi sebagai guru SMP Numalaka mengaku jika dirinya sudah sering menggunakan layanan DAMRI khususnya rute Ambon ke Taniwel di Seram Timur. Dirinya biasa membeli barang kebutuhan pokok di Ambon untuk dijual lagi di toko kelontongnya di Taniwel.



Bus DAMRI Rute Ambon - Laimu sedang melintas di sebuah jembatan di Jalan Trans Seram, Pulau Seram, Maluku, 21/9/2022. Foto: HMS DJPD/WBW.

“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah dengan memberikan layanan perintis ini karena selain mempermudah juga memberikan harga yang terjangkau bagi kami masyarakat di daerah terpencil. Kami mengharapkan adanya kelancaran dalam pelayanan DAMRI ini dengan memperhatikan armada yang aman dan nyaman,” ungkapnya.\*



Silaseike (52 tahun), penumpang bus DAMRI rute Ambon - Taniwel. Foto: HMS DJPD/WBW.



Kantor DAMRI Cabang Ambon. Foto: HMS DJPD/WBW.



# Angkot Feeder New Oplet Musi Emas

Kehadiran layanan angkot *feeder* (New Oplet Musi Emas) semakin meningkatkan minat masyarakat kota Palembang dan sekitarnya menggunakan angkutan massal. Sejak beroperasi secara gratis di dua koridor pada Juni 2022 lalu, sekitar 100 ribu lebih penumpang telah menggunakan angkot *feeder* atau angkutan pengumpan untuk *Light Rail Transit* (LRT) dan *Bus Rapid Transit* (BRT).

Saya senang sejak bulan Juni kita menambah angkot *feeder* LRT, penumpang LRT pun turut naik 25 persen. Saya lapor Presiden, beliau apresiasi, dan menugaskan agar ditambah lagi (koridor angkot *feeder*). Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Palembang, Sabtu (27/8).

Dalam kunjungan kerjanya ke Palembang, Menhub menjajal integrasi antarmoda angkot *feeder* dan LRT. Menhub naik LRT dari Stasiun LRT Sumsel di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, kemudian turun di Stasiun LRT Asrama Haji, dan melanjutkan perjalanan menggunakan angkot *feeder* (berbasis listrik) menuju Hotel Santika Premiere Bandara, untuk menghadiri kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) "Sistem *E-Ticketing* Berbasis Akun untuk Mendukung Integrasi Pembayaran Antarmoda dan Sosialisasi Sistem

Pembayaran BRT," yang diselenggarakan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub.

"Untuk penambahan koridor angkot *feeder* ke depannya akan menggunakan mobil listrik. Tetapi

kita memang butuh suatu studi/kajian untuk melakukan pengamatan dan komparasinya," tutur Menhub.



Mobil listrik DFSK Gelora E secara resmi mulai digunakan sebagai angkot *feeder* LRT yang diberi nama New Oplet Musi Emas di Palembang, 27/8/2022. Foto: HMS DJPD/ MAD.

Kehadiran Angkot Feeder Tingkatkan Minat Masyarakat Palembang Gunakan Angkutan Massal



Sebuah mobil listrik Angkot Feeder LRT Musi Emas atau oplet siap melayani masyarakat kota Palembang pengguna LRT di Palembang, 27/8/2022. Foto: HMS DJPD/MAD

Lebih lanjut, Menhub mendorong dilakukannya integrasi sistem pembayaran *e-ticketing* antarmoda angkutan massal yang ada di kota Palembang, yaitu antara angkot *feeder*, BRT, dan LRT. "Pada sistem *e-ticketing* ada konsep *first mile* dan *last mile*. Jadi ada kepastian dari dan tujuan secara lengkap dan terukur, yang memberi kemudahan bagi masyarakat," ujar Menhub.

Sejak peluncuran angkot *feeder* pada Juni lalu, jumlah penumpangnya mencapai 105.709 orang. Sejalan dengan itu, penumpang LRT per 23 Agustus 2022 juga meningkat, yaitu hingga 1.791.803 penumpang. Jika rata-rata penumpang harian

bisa konsisten, maka hingga akhir tahun diproyeksikan jumlah penumpang LRT bisa melebihi masa sebelum pandemi yaitu sebanyak 2,7 juta penumpang.

Saat ini angkot *feeder* LRT melayani dua rute/koridor, pertama yaitu lintas Talang Kelapa - Talang Buruk via Asrama Haji dengan panjang rute 20,4 Km. Rute kedua yaitu lintas Asrama Haji - Sematang Borang via jalan Noerdin Pandji dengan panjang rute 40.2 Km.

Ke depannya, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat akan melanjutkan pengembangan layanan angkot *feeder* pada 2023. Dimana terdapat lima rute/

koridor yang direncanakan, yaitu: Makrayu-Palembang Icon, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor-Sukabangun I, Terminal Plaju-Tegal Binangun-Jakabaring, Komplek OPI-Komp. TOP-St. LRT DJKA, serta Perum Talang Betutu-Simpang Kades.

Turut hadir dalam peninjauan Gubernur Sumsel Herman Deru, Walikota Palembang H. Harnojoyo, Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Direktur Angkutan Jalan Suharto, beserta jajaran Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Sumsel-Babel, Balai LRT Sumsel, dan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Sumsel.(\*)

**K**ota adalah tentang perpindahan orang bukan mobil. *Urban mobility* adalah bagaimana orang dapat berpindah dengan semua pilihan yang ada. Mobil bukannya dilarang di perkotaan, tapi prioritas pergerakan kota diberikan pada moda yang paling efisien menggunakan ruang jalan (Sony Sulaksono Wibowo, Juli 2022).

Dominasi penduduk perkotaan (*urban population*) terhadap jumlah penduduk di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Worldometers mencatat pada 2019 jumlah penduduk perkotaan di Indonesia sebanyak 150,9 juta jiwa atau 55,8 persen dari total penduduk Indonesia yang sebesar 270,6 juta jiwa.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, sebanyak 56,7% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan tahun 2020. Persentase tersebut diprediksi terus meningkat menjadi 66,6 persen pada 2035. Bank Dunia juga memperkirakan sebanyak 220 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2045. Jumlah itu setara dengan 70 persen dari total populasi di tanah air.

Sudah barang tentu untuk menggerakkan mobilitas secara bersamaan dalam waktu bersamaan pasti akan memerlukan fasilitas transportasi umum massal. Jika masing-masing individu menggunakan kendaraan pribadi, tentunya akan menimbulkan kemacetan, peningkatan populasi udara, penggunaan BBM bertambah, tingkat stress warga meningkat, angka kecelakaan juga tinggi.

Kajian Bappenas bersama Bank Dunia (2019), antara lain menyebutkan pangsa angkutan umum Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota-kota lainnya rata-rata kurang dari 20 persen.



Trans Metro Deli



Trans Jogja

# PRIORITASKAN TRANSPORTASI UMUM



Oleh: **Djoko Setijowarno**

**Di Indonesia, pengguna transportasi umum identik dengan kaum melarat alias kategori *captive*, tidak ada pilihan moda. Lain halnya di mancanegara, penggunaannya adalah kaum konglomerat alias orang kaya, walau punya pilihan moda. Pasalnya, kesadaran akan manfaat transportasi umum yang dimulai adanya keputusan politik eksekutif dan legislatif untuk berpihak pada penyelenggaraan transportasi umum.**

Kota Jakarta, Surabaya dan Bandung masuk dalam kota termacet di Asia. Kota Jakarta menduduki peringkat 10 dengan 53 persen tingkat kemacetan dibandingkan kondisi normal atau tidak macet di kota tersebut. Keterbatasan sistem angkutan umum massal menyebabkan kemacetan yang akhirnya berdampak pada kerugian ekonomi. Akibat kemacetan, peningkatan 1 persen urbanisasi di

Indonesia hanya berdampak pada peningkatan 1,4 persen PDB per kapita. Kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta mencapai Rp 65 triliun per tahun. Pada 5 wilayah metropolitan (Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar) kerugian mencapai Rp 12 triliun per tahun.

Beberapa sumber menyebutkan belanja transportasi warga dibanding penghasilan bulanan

untuk Kota Beijing 7 persen, Paris 3 persen, Singapura ditekan menjadi kurang 3 persen. Sementara di banyak kota metropolitan dan besar di Indonesia rata-rata masih di atas 25 persen.

### Program Buy the Service

Selain Kota Jakarta (tahun 2004 dimulai dengan 'Busway' Trans Jakarta), sejak tahun 2020 Kementerian Perhubungan sudah dikembangkan transportasi perkotaan berbasis sistem transit di 11 kota. Kesebelas kota itu adalah Medan (Trans Metro Deli), Palembang (Trans Musi Jaya), Bogor (Trans Pakuan), Yogyakarta (Trans Jogja), Bandung (Trans Metro Bandung), Purwokerto (Trans Banyumas), Solo (Batik Solo Trans), Surabaya (Trans Semanggi Surabaya), Surabaya (Trans Surabaya Bus), Banjarmasin (Trans Banjarbakula), Denpasar (Trans Metro Denpasar), dan Makassar (Trans Mammisanata).

Selain itu masih ada juga sejumlah pemda turut mengembangkan transportasi umum, seperti Kota Banda Aceh (Trans Kutaraja), Kota Padang (Trans Padang), Kota Semarang (Trans Semarang), Pemprov. DI Yogyakarta (Trans Jogja), Pemprov. Jawa Tengah (Trans Jateng), Pemprov. Bali (Trans Sarbagita), Kab. Tabanan (Trans Serasi).

Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan (amanah pasal 158 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Untuk mengimplementasikan transportasi umum perkotaan, diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Perkotaan. Angkutan Massal Perkotaan merupakan *public goods*, sehingga Pemerintah menjadi penanggung risiko dalam penyediaannya. Program *Buy the Service* (BTS) dilakukan dengan membeli layanan (memberikan subsidi 100 persen) dari operator dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Di samping itu, pemda juga harus berperan untuk menjaga keberlangsungan program ini.

**Pertama**, pembuatan halte. Halte dapat berupa bus stop, halte eksisting (revitalisasi) atau kerjasama dengan pihak swasta (CSR perusahaan swasta, memanfaatkan halte sebagai media iklan). **Kedua**, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dapat berupa kesadaran untuk kembali ke angkutan umum serta tata cara menggunakan angkutan umum. **Ketiga**, Pemerintah Daerah diharapkan melakukan *push strategy* seperti pembatasan ruang (ganjil genap) atau waktu (*bus priority in peak hour*), tarif parkir progresif, mengurangi lahan parkir, jalan berbayar, mewajibkan



Trans Metro Pasundan

## INFO ANGKUTAN

ASN menggunakan transportasi umum atau kebijakan lain yang berpihak ke transportasi umum. **Keempat**, daerah diharapkan melakukan *survey* kondisi lalu lintas sebelum, saat dan sesudah dilaksanakannya BTS untuk didapat data yang akurat sebagai dasar evaluasi kemanfaatan program.

**Kelima**, Pemerintah Daerah diharapkan juga dapat bersama Pemerintah Pusat untuk sama-sama mendukung program ini serta melihat dampak ekonomi serta lingkungan yang dapat tercipta.

Kendala pembenahan transportasi umum di daerah antara lain, masih minim keberpihakan kepala daerah pada program transportasi umum di daerah, masih ada kebijakan pemda belum mendukung program *push strategy*, sepeda motor yang mudah didapat, masa pandemi masih membuat warga khawatir menggunakan transportasi umum, minim sosialisasi penggunaan transportasi umum, fasilitas halte yang belum ada, fasilitas pejalan kaki masih kurang, tidak memiliki kartu pembayaran. Juga penetapan tarif yang hingga sekarang belum dilakukan, padahal operasional sudah hampir dua tahun.



Trans Banyumas



Trans Pakuan Bogor

Tingkat isian bukan satu-satunya penentu keberhasilan program angkutan perkotaan. Masih ada parameter lain pula yang dapat dilihat, seperti menurunnya belanja transportasi warga, polusi udara menurun, angka kecelakaan lalu lintas menjadi rendah, kemacetan lalu lintas berkurang, waktu perjalanan semakin cepat, tingkat kedisiplinan warga meningkat, penggunaan BBM menurun, kesejahteraan pengemudi terjamin, ketepatan waktu terjamin.

### Push and Pull Strategy

Penyelenggaraan transportasi umum oleh pemerintah pusat dengan skema pembelian layanan (*buy the service*) dapat

membantu mengurangi beban pengusaha angkutan umum di daerah.

*Push strategy* (strategi mendorong) dilakukan Pemda untuk mendorong masyarakat menggunakan bus. Manajemen ruang dan waktu akses kendaraan pribadi yang mengatur adalah pemerintah daerah. Manajemen ruang dalam bentuk pengaturan ruang jalan, misalnya melarang parkir di tepi jalan atau menaikkan tarif parkir di jalan-jalan yang berada di pusat kota.

*Pull strategy* (strategi menarik) dilakukan Pemerintah Pusat untuk menarik masyarakat menggunakan bus. Pemerintah menjadi penanggung risiko penyediaan layanan angkutan dikarenakan tingginya Biaya Operasional Angkutan Massal. Pemerintah memberikan lisensi pelaksanaan pelayanan kepada operator yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah memberikan prioritas kepada angkutan umum supaya memiliki keunggulan dibandingkan kendaraan pribadi.

### Keberlanjutan Program

Transportasi umum menjadi lebih menarik jika waktu perjalanan lebih cepat dibanding kendaraan pribadi, waktu tunggu di bawah 10 menit; jangkauannya



luas bisa mencapai semua *catchment area*; waktu layannya sepanjang hari (dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan), disediakan *park and ride* atau fasilitas lain, seperti membawa sepeda, tarifnya murah.

Di sisi lain untuk menjamin keberlanjutan bisnis transportasi umum, memang perlu menggali lebih banyak lagi sumber alternatif pendanaan atau investasi demi untuk keberlanjutan program ini, sehingga dapat selalu memberikan layanan transportasi umum yang andal. Bukanlah hal yang mudah di tengah kekurangan pedulian

kepala daerah terhadap layanan transportasi umum di daerahnya.

Bimbingan teknis dan bisnis pengelolaan transportasi umum di daerah harus diberikan pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah yang sudah mengoperasikan Program

1. Bus Batik Solo Trans
2. Halte Bus Batik Solo Trans
3. Angkot Feeder Batik Solo Trans
4. Bus Trans Semanggi Suroboyo

BTS. Yakni, dengan mencontoh sistem transportasi menyeluruh yang sudah dikelola Pemprov. DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan (KRL Jabodetabek, MRT Jakarta, LRT Jakarta, Bus Trans Jakarta, fasilitas pejalan kaki, fasilitas sepeda, sistem integrasi) selama ini. Tidak

perlu lagi harus studi banding ke mancanegara, cukup ke Jakarta yang pengelolaannya sudah bisa dicontoh daerah. (\*)

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat

# PPNS LLAJ TINGKATKAN PENGAWASAN DAN GAKKUM

Dengan semakin tingginya mobilitas transportasi tentunya kecenderungan pelanggaran terhadap lalu lintas dan angkutan jalan juga akan terus meningkat, hal ini akan sulit apabila proses pengawasan dan penindakan hukum masih dilaksanakan secara konvensional.

Tingginya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan orang dan barang yang terjadi secara beruntun di beberapa daerah disertai dengan maraknya angkutan ilegal dan pelanggaran *Over Dimension* dan *Over Loading* (ODOL) membuat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kian gencar salah satunya dalam meningkatkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai pengawasan dan penegakkan hukum terhadap angkutan orang dan barang dengan menggelar Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) PPNS Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Adapun kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari sejak 23 hingga 25 Agustus 2022 di Grand Mercure Setiabudi, Bandung, Jawa Barat.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa pada akhir-akhir ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan mendapat sorotan tajam terkait dengan terus berulangnya

kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimpa angkutan barang maupun angkutan penumpang sehingga menimbulkan banyak korban jiwa,” kata Cucu Mulyana selaku Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan saat membacakan sambutan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Lebih lanjut Cucu mengatakan, dengan semakin tingginya mobilitas transportasi tentunya kecenderungan pelanggaran terhadap lalu lintas dan angkutan jalan juga akan terus meningkat, hal ini akan sulit apabila proses pengawasan dan penindakan hukum masih dilaksanakan secara konvensional.

“Saya mengingatkan kepada para PPNS untuk terus mengikuti perkembangan teknologi seperti penggunaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), *Weigh in Motion* (WIM). Agar ke depannya pemanfaatan teknologi



dapat terus dilakukan dalam hal pengawasan dan penegakkan hukum LLAJ,” ujarnya.

Dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang diwakilkan oleh Direktur Lalu Lintas Jalan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada BPTD dan insan PPNS berprestasi yang melaksanakan kegiatan penegakan hukum secara tegas melalui proses P21 dan inkrah di pengadilan. Penghargaan diberikan kepada BPTD Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan BPTD Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Barat serta PPNS berprestasi kepada Irda Hariyono Soekirno selaku Koorsatpel UPPKB Karang Joang Kilo 17 serta Andi Amir Naulir selaku Korsatpel UPPKB Maccopa.



Petugas mengukur dimensi kendaraan angkutan barang pada saat Operasi Penegakan Hukum Kendaraan Angkutan Barang di Tol Cikarang Km 29, 30/12/2021 (HMS DJPD/WBW)

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Pengendalian Operasional, Deny Kusdiana, menyampaikan laporannya bahwa pelaksanaan kegiatan Rakernis ini merupakan salah satu media untuk mengumpulkan para PPNS bidang LLAJ dalam kerangka pembinaan teknis oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat guna menambah pengetahuan bagi para PPNS yang terjun langsung ke lapangan untuk membantu kejadian kecelakaan lalu lintas.

Di sisi lain, Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan LLAJ, Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT), Ahmad Wildan selaku Narasumber menyampaikan kecelakaan lalu lintas jalan terjadi jika pengemudi tidak mampu mengendalikan kendaraan, tidak mampu memahami jalan dan

masalah teknis pada kendaraan yang mengalami kecelakaan diakibatkan pengemudi yang tidak dapat mengendalikan system rem, system transmisi, system kemudi dan pecah ban.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan secara *hybrid* ini, dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dadang Hermawan, Kepala BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat, Denny Michels Adlan, para Kadishub Provinsi/Kab/Kota se-Indonesia, Kepala Biro Hukum, Sekjen Kemenhub serta Direktur Pidana, Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham. (\*)



Kepala Bagian Hukum & Humas, Endy Irawan menjadi narasumber pada Rakernis PPNS LLAJ di Bandung, 24/8/2022. (HMS DJPD/RP)



Direktur Lalu Lintas Jalan, Cucu Mulyana, secara resmi membuka Rakernis PPNS LLAJ di Bandung, 24/8/2022. (HMS DJPD/RP)

**M**enindaklanjuti maraknya kejadian kecelakaan bus maupun truk yang terjadi belakangan ini, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan menampung beragam masukan dari pemangku kepentingan terkait baik dari instansi pemerintah, Kepolisian, maupun APM. Untuk menampung masukan tersebut, Ditjen Hubdat menggelar focus group discussion (FGD) “Kupas Tuntas Fenomena Rem Blong” pada Selasa (06/09) siang di Hotel Mercure Jakarta Sabang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiarno yang hadir dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa dengan adanya pembahasan melalui FGD hari ini, pihaknya berharap tidak akan ada lagi kecelakaan kendaraan baik bus maupun truk ke depannya.

“Masalah ini adalah masalah lama dan merupakan masalah bersama, semua memiliki tanggung jawab yang sama, tidak dapat hanya ditanggulangi oleh 1 institusi. Regulator, pengusaha semua bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Mudah-mudahan dari diskusi ini ada jalan terbaik untuk mengeluarkan kebijakan bagaimana kita menangani dan memikirkan kejadian seperti di Bekasi dan Cibubur,” demikian disampaikan Dirjen Hendro.

Hendro menyatakan bahwa Ditjen Hubdat saat ini perlu masukan dan kritik dari sisi aturan maupun kebijakan sehingga ke depannya dapat digunakan untuk pembenahan.

“Termasuk dari asosiasi diperlukan untuk memberikan masukan. Kir saat ini bukan di Kemenhub melainkan di daerah dan apakah kompetensinya mencukupi? Saya tidak tahu juga karena perkembangan teknologi transportasi terus berkembang



Kondisi kecelakaan truk menabrak tiang di Kota Bekasi (Hanafi/detikcom).

## UPAYA TINDAK LANJUT CEGAH REM BLONG

**Kalau di jalan menurun saat direm kemudian rem diangkat maka roda akan berputar lebih cepat karena gaya gravitasi bumi yang akan menarik terus menerus. Proses pengereman di jalan menurun tidak akan menghilangkan energi potensialnya sehingga akan memaksa pengemudi menginjak rem berkali-kali dengan pengereman panjang.**

dan harus diikuti oleh pengujinya. Kami sebagai regulator ingin transportasi aman dan selamat di jalan, semua berjalan dengan baik ekonomi tumbuh dengan baik. Semoga diskusi hari ini menghasilkan sesuatu yang dapat kita tindaklanjuti untuk mengurangi kecelakaan, kalau soal ODOL ini tidak selesai-selesai

maka saya ajak kita bersama-sama menuntaskannya. Saya akan terus berkomunikasi intens dengan Korlantas sebagai salah satu upaya,” tambah Dirjen Hendro.

Melalui kegiatan yang sama, Ahmad Wildan, Plt Sub Komite LLAJ Komite Nasional

Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkapkan hasil investigasi dari tahun 2017-2022 kecelakaan rem blong bus dan truk terjadi di jalan menurun.

“Hanya sedikit yang terjadi di jalan datar. Ini menunjukkan



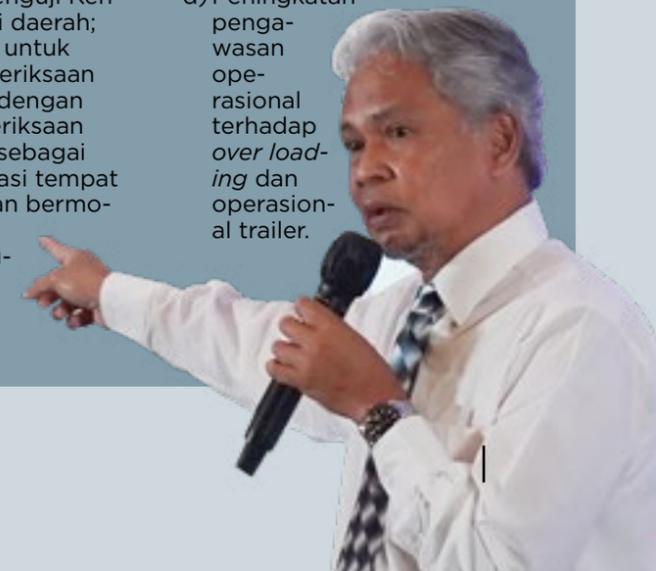
### Tips mengemudi di jalan menurun

**Yang perlu diperhatikan untuk meminimalisir kecelakaan kendaraan bermotor yaitu:**

- a) Membuat *crash* program penyediaan tenaga Penguji Kendaraan Bermotor di daerah;
- b) Mendorong daerah untuk melaksanakan pemeriksaan persyaratan teknis dengan memasukkan pemeriksaan persyaratan teknis sebagai item utama akreditasi tempat pengujian kendaraan bermotor;
- c) Melakukan bimbingan teknis pemeriksaan persyaratan teknis secara lebih

*massive* baik kepada penguji kendaraan bermotor maupun petugas terminal, jembatan timbang maupun PPNS;

- d) Peningkatan pengawasan operasional terhadap *over loading* dan operasional trailer.



adanya pengaruh geometrik jalan. Yang menarik lagi, polanya sama yaitu semua menggunakan gigi tinggi. Kedua, berakhir di gigi netral. Ini adanya pengaruh prosedur mengemudi. Jalan menurun yang memiliki kemiringan lebih dari 10% dan panjang landai kritis lebih dari 500 m ternyata akan menciptakan energi potensial yang sangat besar,” kata Wildan

Menurut Wildan, cara mengemudi kendaraan bus dan truk di jalan datar dan menurun adalah hal berbeda. “Kalau di jalan menurun saat direm kemudian rem diangkat maka roda akan berputar lebih cepat karena gaya gravitasi bumi yang akan menarik terus menerus. Proses pengereman di jalan menurun tidak akan menghilangkan energi potensialnya sehingga akan memaksa pengemudi menginjak

rem berkali-kali dengan pengereman panjang,” jelasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Direktur Lalu Lintas Jalan Cucu Mulyana, Direktur Sarana Transportasi Jalan Danto Restyawan, Pengamat Transportasi Darmaningtyas sebagai moderator, serta pengamat transportasi lainnya, Djoko Setijowarno, Agus Pambagio, dan Azas Tigor Nainggolan hadir sebagai peserta diskusi.

Selain itu hadir juga sejumlah pemangku kepentingan seperti Korlantas Polri, perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, maupun asosiasi seperti IPKBI, GAIKINDO, ASKARINDO, ALFI, ORGANDA, serta sejumlah agen pemegang merek (APM).(\*)



Suasana kegiatan Focus Group Discussion (FGD) “Kupas Tuntas Fenomena Rem Blong” pada Selasa (06/09) siang di Hotel Mercure Sabang Jakarta



Dari kiri ke kanan: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia dalam acara Road Safety Campaign di kampus UGM, Yogyakarta, 27/8/2022 (HMS DJPD/CAS).

**M**enteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kompak menyosialisasikan kampanye keselamatan jalan (*road safety campaign*) tahun 2022 yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan, di Yogyakarta, Sabtu (27/8).

Ketiga menteri mengingatkan para pengendara kendaraan bermotor, khususnya roda dua (sepeda motor), untuk memperhatikan aspek keselamatan dalam berkendara. Mengingat, mayoritas kecelakaan di jalan melibatkan pengendara sepeda motor.

“Saya mendukung kegiatan ini. Road safety campaign sangat penting bagi kita semua karena nyawa manusia yang terbunuh di jalan karena kecelakaan lalu lintas itu jauh lebih banyak dari korban Covid-19, dan jauh di atas rata-rata penyakit lain,” ungkap Menteri Mahfud.

Pada kesempatan yang sama,

## TIGA MENTERI KAMPANYEKAN KESELAMATAN JALAN

Menhub mengatakan, sekitar 73% kecelakaan di jalan melibatkan sepeda motor. “Mayoritas yang mengalami kecelakaan adalah generasi muda. Kegiatan ini menjadi langkah kecil kami untuk terus mengingatkan masyarakat tentang pentingnya memperhatikan aspek keselamatan berkendara,” tutur Menhub.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda motor terjadi karena kurangnya kesadaran pengguna sepeda motor akan keselamatan, khususnya terkait penggunaan helm, cara

berkendara yang berkeselamatan (mengatur batas kecepatan dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara), kelengkapan SIM dan STNK, memastikan kondisi motor dalam keadaan laik, dan aspek lainnya.

Untuk itu, lanjut Menhub, perlu dilakukan pelatihan keselamatan berkendara/*safety riding* secara berkelanjutan. “Ada empat prinsip yang harus dipegang saat berkendara yaitu *alertness* atau kewaspadaan, *awareness* atau kesadaran, *attitude* atau perilaku, serta *anticipation* atau antisipasi,” ujarnya

Data Korlantas Polri menyebutkan

### INFO SARANA

pada tahun 2021 angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 103.645 kasus. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan data tahun 2020 yang sebanyak 100.028 kasus. Tercatat sebanyak korban meninggal dunia sebanyak 25.266 korban jiwa, luka berat berjumlah 10.553 orang, luka ringan berjumlah 117.913 orang,

dengan kerugian materi mencapai Rp 246 miliar.

Road Safety Campaign 2022 ini juga melibatkan sejumlah komunitas sepeda motor dan perwakilan mahasiswa/mahasiswi dari sejumlah universitas di Yogyakarta.

Turut hadir dalam kegiatan Road Safety Campaign 2022, Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia, Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, dan sejumlah pejabat terkait. Acara ini juga dimeriahkan musisi nasional Armand Maulana.\*



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia bersama jajaran mengendarai sepeda motor listrik dalam acara Road Safety Campaign di kampus UGM, Yogyakarta, 27/8/2022 (HMS DJPD/CAS).

# PELUANG SWASTA KELOLA UJI KIR

**Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang mengatur pengujian kendaraan bermotor yang dapat dikerjasamakan dengan BUMN, BUMD, BUMDES, dan swasta.**

**G**una mewujudkan keselamatan jalan, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyosialisasikan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2022 mengenai Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Kegiatan tersebut digelar pada tanggal 3 - 5 Agustus 2022 di Hotel Merumatta Senggigi Lombok, Nusa Tenggara Barat.

“Untuk mengatur hal-hal lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang mengatur pengujian kendaraan bermotor yang dapat dikerjasamakan dengan BUMN, BUMD, BUMDES, dan swasta yaitu pengujian berkala kendaraan bermotor oleh agen tunggal pemegang merek dan swasta,” ujar Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Marta

Lebih lanjut Marta menyampaikan bahwa PM tersebut juga mengatur perizinan berusaha pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan oleh agen tunggal pemegang merek dan swasta, akreditasi bengkel umum yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor dan pengujian berkala untuk kendaraan bermotor listrik.

“Selain itu, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang mengatur Persyaratan, Akreditasi, Klasifikasi Akreditasi dan Tata Cara Akreditasi UPUBKB, serta Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3291 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang mengatur mengenai Kartu Uji dan Tanda Uji yang dilengkapi dengan *Radio Frequency Identification* (RFID) dan penggunaan e-sertifikat,” tambah Marta.

Hardisarwono saat membacakan sambutan Direktur Jenderal Perhubungan Darat secara virtual.



Petugas sedang melakukan Uji KIR atau Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap. Sumber: cilacapkab.go.id

Marta berharap dengan adanya sosialisasi dapat menghindari multitafsir dan aturan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal oleh para regulator dan seluruh stakeholders terkait.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI), Fatchuri menuturkan perlu adanya peningkatan pelayanan pada pengujian berkala kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan di jalan mengingat banyaknya kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini.

“Idealnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis digitalisasi serta mendapat dukungan sarana, prasarana dan perbankan. Penataan pelayanannya harus terdiri dari 6 pilar yaitu Pendaftaran Online, Sistem Pembayaran Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD), Sistem Integrasi Alat Uji, Bukti



Kasubdit Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Tarma, sedang menyampaikan materi terkait penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor. Lombok, NTB, 4/8/2022. (HMS DJPD/BYU)

Lulus Uji Elektronik berbasis *Smart Card* RFID, Informasi Hasil Uji melalui Aplikasi, serta Sarana dan Prasarana Pendukung seperti Loket Berbasis Sistem *Drive Thru*,” kata Fatchuri.

Dalam kaitannya dengan pengujian kendaraan bermotor listrik, Fatchuri menjabarkan perlu dipersiapkan juga peralatan uji yang memadai serta alat pelindung diri bagi para penguji di antaranya sarung tangan listrik dan sepatu anti listrik.

Di samping itu, Kasubdit Uji Berkala Kendaraan Bermotor Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Tarma menjelaskan lebih detail mengenai 14 aturan baru yang diatur pada PM 19 Tahun 2021 meliputi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Listrik, Unit Pelaksana Uji Berkala, Kewajiban Pelaporan Uji Berkala, Akreditasi UPUBKB, Penghitungan Biaya Jasa Pelayanan, Penyeragaman Format Kartu Induk Uji dan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji, Pembinaan dan Pengawasan, hingga Sanksi Admisitrasi.

“Adapun untuk Akreditasi UPUBKB, berdasarkan data yang kami himpun sampai dengan bulan Agustus 2022, dari 329 UPUBKB yang terakreditasi sebanyak 72 UPUBKB terakreditasi A, 206

UPUBKB terakreditasi B, 18 UPUBKB terakreditasi bersyarat dan 33 lainnya terakreditasi C. Kita harus sama-sama berupaya agar semua UPUBKB dapat terakreditasi dan mendapat akreditasi A,” pungkas Tarma.

Di sisi lain, Tarma menambahkan pihaknya masih terus mengembangkan penerapan sistem BLU-e agar ke depan terintegrasi dengan RFID, ATMS, e-hubdat, ETL, JTO Terminal, serta *Weigh In Motion* UPPKB. Tentunya hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan, Keterbukaan Informasi Publik, dan mendukung program Zero ODOL 2023.

Kegiatan sosialisasi yang dimoderatori oleh Kasi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan BPTD Wilayah VII Provinsi Sumsel-Babel, Alexander Pardede ini dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum dan Humas, Endy Irawan dan diikuti oleh 55 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi, perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, perwakilan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, perwakilan Politeknik Transportasi Darat Bali, serta perwakilan dari beberapa wilayah BPTD di Indonesia.(\*)

**M**enteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Minggu (17/7) melakukan tinjauan ke PT INKA di Madiun, Jawa Timur, untuk mengecek progres pembangunan Bus Listrik Merah Putih (BLMP) dan memastikan pengerjaannya dapat selesai tepat waktu, dalam rangka mendukung penyelenggaraan event G20 pada November 2022 mendatang.

Menhub meminta PT INKA untuk mempercepat pembangunan, agar masih ada waktu untuk melakukan perbaikan-perbaikan sebelum dapat digunakan.

“Kita harus perhitungkan bus ini dengan suatu standar keselamatan yang baik,” ujar Menhub.

Lebih lanjut Menhub mengapresiasi PT INKA yang bekerja sama dengan Kementerian Ristekdikti dan sejumlah perguruan tinggi, dalam penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih dari 50%.

“Ini akan membuka ruang kerja baru bagi produk dalam negeri dan juga kesempatan bagi para akademisi di perguruan tinggi untuk melakukan riset dan inovasi, yang selama ini hanya bisa dilakukan di luar negeri,” tutur Menhub.

Apresiasi juga diberikan Menhub kepada Kemenristekdikti yang telah mendukung pendanaan riset yang dituangkan dalam bentuk karya yang terhilirisasi, seperti halnya pembangunan bus listrik dalam negeri. “Saat ini kita bangun 30 bus listrik dan ke depannya akan terus bertambah,” ucapnya.

Selanjutnya, Menhub meminta sejumlah operator BUMN seperti Damri, PT KAI, dan INKA untuk terus mendukung dan membuka kesempatan bagi dunia



Sejumlah bus listrik merah putih dalam proses pembangunan di PT INKA Madiun, 17/7/2022. Foto: HMS DJPD/BYU

daerah seperti: Bandung dan Surabaya.

Dalam kunjungannya ke PT INKA, Menhub juga menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penelitian dan Pengembangan Kereta Ringan Berbasis Hybrid dan Cerdas yang dilakukan BRIN, PT. INKA, PT. KAI dan beberapa Perguruan Tinggi Negeri.

Kereta ringan *hybrid* dan cerdas merupakan pengembangan dari beberapa produk INKA yakni LRT Sumsel, LRT Jabodebek, dan Tram Mover dengan teknologi seperti persinyalan otomatis/*brake* otomatis apabila melewati batas kecepatan, driverless Grade of Automation (GOA) 3, terintegrasi dengan Internet of Things (IoT), serta Smart Maintenance.

PTN yang akan terlibat dalam pembuatan kereta ringan hybrid dan cerdas yakni UGM Yogyakarta, ITB Bandung, UNDIP Semarang, Universitas Indonesia, Telkom University, Politeknik Negeri Madiun, ITS Surabaya, UNS Surakarta dan UB Malang.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Walikota Madiun Maidi, Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno dan Dirut PT. INKA Budi Noviantoro.\*



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau progres pembangunan bus listrik merah putih di PT INKA Madiun, 17/7/2022. Foto: HMS DJPD/BYU

# PROGRES BUS LISTRIK UNTUK G20

**Menteri Perhubungan meninjau progres pembangunan Bus Listrik Merah Putih untuk G20 di PT INKA, Madiun. Dirinya memastikan kendaraan-kendaraan tersebut dapat selesai tepat waktu.**

pendidikan untuk melakukan riset pengembangan teknologi transportasi secara lebih intensif.

“Tidak mungkin dunia industri berjalan sendiri, harus kerja sama dengan sektor pendidikan. Berikutnya kami memberikan kesempatan kepada dunia perguruan tinggi untuk turut serta dalam pengembangan transportasi kereta ringan atau LRT,” kata Menhub.

Sebagai informasi, produksi BLMP yang akan digunakan pertama kali untuk event G20 merupakan penugasan oleh Kemenristekdikti kepada konsorsium Perguruan Tinggi dan PT INKA (Persero). PTN yang terlibat dalam pengerjaan bus G20 yakni dari ITS Surabaya, UGM Yogyakarta, UNAIR Surabaya, ISI Denpasar.

Keunggulan dari BLMP diantaranya mulai dari noise,

suspensi, serta optimasi pengurangan berat kendaraan menjadi lebih ringan, karena merupakan hasil pengembangan dari bus sebelumnya berdasarkan masukan dari berbagai pihak.

Adapun spesifikasi BLMP menggunakan komponen yang berasal dari beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Indonesia, sehingga TKDN dapat meningkat menjadi lebih dari 70%. Daya tempuhnya mencapai 160 km dan hanya memerlukan waktu 2,5 jam untuk proses *charging* hingga kembali siap beroperasi.

BLMP juga telah dipesan oleh DAMRI dengan *system Buy The Service* (BTS) untuk dioperasikan di beberapa



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno beserta jajaran meninjau progres pembangunan bus listrik merah putih di PT INKA Madiun, 17/7/2022. Foto: HMS DJPD/BYU

# INTEGRASI ANTAR MODA DI TERMINAL KLATEN

**Kita akan bekerja sama dengan Pemda agar angkutan perkotaan bisa masuk ke terminal ini, supaya semakin memudahkan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum baik di dalam kota maupun ke luar kota.**

**K**ementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus meningkatkan integrasi antarmoda di Terminal Tipe A Ir. Soekarno di Klaten, Jawa Tengah,

agar pelayanannya semakin optimal. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan peninjauan, Minggu (17/7).

“Saat ini angkutan dalam kota/ perkotaan belum terjadi di terminal ini. Untuk itu, kita akan bekerja sama dengan Pemda agar angkutan perkotaan bisa masuk ke terminal ini, supaya semakin memudahkan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum baik di dalam kota maupun ke luar kota,” ujar Menhub.

Saat ini, serah terima aset Terminal Tipe A Ir. Soekarno Klaten dari Pemda (Pemkab Klaten) kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenhub masih dalam proses penyelesaian. Menhub berharap, kolaborasi dengan Pemda Klaten berjalan baik, sehingga revitalisasi Terminal Tipe A Ir. Soekarno Klaten bisa berjalan dengan baik dan lancar.

“Tadi ada beberapa catatan dari Bupati akan kami tampung, dan kita akan evaluasi mana yang bisa



1. Menhub bersama Bupati Klaten meninjau Terminal Tipe A Ir. Soekarno Klaten
2. Menhub didampingi Dirjen Hubdat Hendro Sugiarno memberikan pernyataan pers di Terminal Tipe A Ir. Soekarno Klaten
3. Sebuah Bus di Terminal Tipe A Ir. Soekarno Klaten.  
Foto: HMS DJPD/ BYU



## TERMINAL TIPE A IR. SOEKARNO KLATEN

### Alamat

Jalan Jombor Indah Engahan, Buntalan, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57419

### Fasilitas Utama

- Jalur Berangkat
- Ruang Tunggu Penumpang
- Tempat Naik Penumpang
- Perlengkapan Jalan
- Kantor Terminal
- Loket

### Fasilitas Penunjang

- Pos Kesehatan
- Fasilitas Peribadatan
- Fasilitas Umum

### Kios

- Jumlah 95 kios
- Terisi 89 kios

dijalankan oleh kami atau pihak lain,” tutur Menhub.

Sesuai Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan semua terminal yang bertipe A menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di Provinsi Jawa Tengah, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat mengelola sebanyak tiga terminal tipe A yakni: Terminal Tirtonadi di Solo, Terminal Mangkang di Semarang, dan Terminal Ir. Soekarno di Klaten.

Revitalisasi Terminal Tipe A yang dilakukan oleh Kemenhub menerapkan konsep baru pengelolaan sebuah Terminal di

Indonesia, yang memiliki integrasi antar moda baik, serta memiliki nilai tambah yang mendukung berbagai sektor lainnya seperti: pariwisata, industri, sosial, seni budaya, ekonomi dan sektor lainnya. Diharapkan dengan dilakukannya revitalisasi Terminal Tipe A, akan semakin meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi massal khususnya Bus.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Klaten Sri Mulyani, Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiarno dan Sesditjen Perhubungan Darat Marta Hardisarwono.(\*)



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Hubdat Hendro Sugiarno dan Direktur Prasarana Transportasi Jalan Popik Montanasyah, serta Sekda Kota Salatiga Wuri Puji Astuti meninjau proses revitalisasi Terminal Tipe A Tingkir Salatiga, 7/8/2022. Foto: HMS DJPD/MAD

# REVITALISASI TERMINAL TINGKIR SALATIGA JADI PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT

**Kehadiran Terminal Tingkir Salatiga diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan, khususnya kepada para UMKM di daerah Salatiga dan sekitarnya.**

**K**ementerian Perhubungan tengah membangun atau merevitalisasi Terminal Tipe A Tingkir di Salatiga, Jawa Tengah. Terminal yang dibangun dengan konsep *mixed use* ini nantinya akan menjadi pusat kegiatan masyarakat dan UMKM.

“Kalau nanti mau cari kuliner favorit Salatiga ada di terminal ini. Kemudian nanti juga ada ruang pertemuan. Jadi semua kegiatan masyarakat bisa difasilitasi di Terminal Tingkir,” demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau progres

pembangunan Terminal Tingkir, Minggu (7/8).

Menhub menjelaskan, kehadiran terminal ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan, khususnya kepada para UMKM di daerah Salatiga dan sekitarnya. “Kita bangun terminal ini agar konektivitas berjalan dengan baik dan juga bisa melayani masyarakat dengan lebih maksimal dengan fasilitas yang ada,” ucap Menhub.

**“Kita bangun terminal ini agar konektivitas berjalan dengan baik dan juga bisa melayani masyarakat dengan lebih maksimal dengan fasilitas yang ada”.**

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Salatiga Wuri Puji Astuti menyambut baik dibangunnya Terminal Tingkir yang diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Salatiga dan sekitarnya. Menurutnya, lokasi



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Hubdat Hendro Sugiarno dan Kepala BPTD X Jawa Tengah-DIY Eko Agus Susanto, serta Sekda Kota Salatiga Wuri Puji Astuti meninjau proses revitalisasi Terminal Tipe A Tingkir Salatiga, 7/8/2022. Foto: HMS DJPD/MAD

terminal ini sangat strategis karena berada di tengah kota.

“Kami akan mengupayakan agar kegiatan pelayanan masyarakat bisa dilakukan di sini. Kemudian, segala produk UMKM yang menjadi unggulan juga akan dipusatkan di sini. Ini akan menjadi pusatnya oleh-oleh khas Salatiga,” tuturnya.

Sesuai amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pengelolaan Terminal Tipe A yang sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah diserahkan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub. Selanjutnya, Kemenhub melakukan revitalisasi sejumlah Terminal Tipe A yang ada di Indonesia sebagai upaya peningkatan pelayanan angkutan jalan.

Melalui revitalisasi ini, terminal bus tidak hanya berfungsi sebagai tempat naik turun penumpang, melainkan juga memiliki fungsi lain (*mixed use*) misalnya seperti: kegiatan perkantoran (*working space*), hotel, pusat perbelanjaan, pusat pelayanan masyarakat, dan juga terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Pembangunan Terminal Tingkir sudah dimulai sejak Februari 2022 dengan target pengerjaan sekitar 240 hari atau diperkirakan akan selesai pada Oktober 2022. Hingga saat ini progres pembangunan fisik sudah mencapai 50,91 persen.

Adapun lingkup pekerjaan revitalisasi ini antara lain: bangunan terminal, fasilitas terminal, kantor terminal, *foodcourt* (kios / agen (90 kios), area parkir, kedatangan dan pemberangkatan bus AKAP dan AKDP, ruang tunggu penumpang, area parkir kendaraan pribadi, ruang genset, pos jaga, *gate entrance*, mushola, dan meubelair, pekerjaan infrastruktur dan *landscape*: pengaspalan jalan lingkungan, kansteen dan penghijauan, lampu PJU (penerangan jalan).

Turut hadir mendampingi Dirjen Perhubungan Darat Irjen Pol Hendro Sugiarno, Direktur Prasarana Transportasi dan Jalan Popik Montanasyah, Kepala BPTD Wilayah X Jateng-DIY Eko Agus Susanto, Kepala Terminal Tipe A Tingkir Tubagus Kresno.\*

## TERMINAL TIPE A TINGKIR SALATIGA

Terminal Tipe A Tingkir ini terletak di Ruas Jalan Raya Kota Salatiga – Solo (Jl. Soekarno – Hatta Tingkir Tengah Salatiga) dengan luas kurang lebih 10.329 m<sup>2</sup> dan luas bangunan kurang lebih 1.700 m<sup>2</sup>.

Saat ini terminal Tipe A Tingkir melayani jalur trayek bus AKAP dengan 9 (Sembilan) rute yaitu: Salatiga – Denpasar, Salatiga – Surabaya, Salatiga – Bandung, Salatiga – Tangerang, Salatiga – Bogor, Salatiga – Jakarta, Salatiga – Palembang, Salatiga – Lampung, dan Salatiga – Bengkulu.

Kemudian, melayani trayek bus AKDP dengan 4 (empat) rute yaitu: Solo – Salatiga – Semarang, Salatiga – Solo – Purwokerto, Solo – Salatiga – Wonosobo, Salatiga – Semarang. Serta melayani 5 (lima) trayek ANGKODES yaitu: Salatiga – Ambarawa, Salatiga – Ampel, Salatiga – Ungaran, Salatiga – Simo dan Salatiga – Karanggede.



Sebagian gedung Terminal Bus Tipe A Mangkang, Semarang, digunakan sebagai Mal Pelayanan Publik Pemkot Semarang. Konsep *Mixed Use* memungkinkan Terminal Tipe A digunakan untuk kegiatan masyarakat tanpa mengurangi fungsinya sebagai simpul transportasi.

**P**andemi Covid-19 telah menurunkan secara drastis jumlah pengguna transportasi di Tanah Air. Tidak ingin infrastruktur yang telah dibangun dengan megah menjadi sia-sia tidak terpakai, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerapkan konsep *Mixed Use* untuk mengoptimalkan fungsi dari terminal.

Diakui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiarno bahwa Pandemi Covid-19 telah meluluhlantakkan semua sendi perekonomian, termasuk transportasi di dalamnya, yang menyebabkan turunnya jumlah penumpang sehingga membuat sepi terminal dan semua sektor pendukungnya. Untuk ini pihaknya berusaha mengaktifkan kembali aktivitas di terminal dengan membuat sebuah terobosan yang juga diharapkan dapat berdampak pada perekonomian masyarakat disekitarnya.

“Sesuai arahan Bapak Menteri Perhubungan bahwa saat ini terminal harus multi fungsi selain ruang tunggu yang nyaman, toilet bersih, dan fungsi pelayanan

# KONSEP MIXED USE OPTIMALKAN FUNGSI TERMINAL BUS TIPE A

**Konsep *mixed use* juga dirancang untuk mengoptimalkan lahan yang ada di terminal dikarenakan pada awal dahulu Pemerintah menginginkan jika terminal sama rapi dan bagusnya dengan bandar udara.**

transportasi daratnya berjalan dengan baik. Dan kita pun berusaha menerjemahkannya dengan konsep *mixed use* terminal. Dan alhamdulillah saat ini sudah terlihat hasilnya, di mana banyak masyarakat yang kembali menggunakan terminal,” kata Hendro.

Ia juga menjelaskan yang dimaksud multi fungsi atau yang biasa disebut *mixed use* adalah

pengoptimalan bagian-bagian lain dari terminal untuk aktivitas masyarakat tanpa mengurangi fungsi utama terminal yaitu naik dan turun penumpang dengan bus menuju tempat yang diinginkan.

Hendro juga menjelaskan bahwa gagasan *mixed use* dalam terminal ini adalah upaya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat



Konser God Bless di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Solo, 17/7/2022. Foto: HMS DJPD/BYU

untuk mengoptimalkan fungsi dari terminal yang pada saat pandemi Covid-19 lalu mengalami penurunan aktivitas naik dan turun penumpang. Terlebih lagi, beberapa terminal yang dibangun oleh Pemerintah berukuran cukup luas.

“Konsep *mixed use* juga dirancang untuk mengoptimalkan lahan yang ada di terminal dikarenakan pada awal dahulu Pemerintah menginginkan jika terminal sama rapi dan bagusnya dengan bandar udara. Selain itu apa yang kita lakukan ini untuk memberi masukan kepada negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” katanya.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Popik Montanasyah juga menjelaskan selain diterpa oleh Pandemi Covid-19, kemajuan teknologi dan kemudahan akses mendapat kredit kepemilikan kendaraan bermotor juga menurunkan kegiatan masyarakat menggunakan bus dan terminal serta fasilitas pendukungnya lainnya. Tidak ingin terminal ditinggal oleh para penggunanya, maka pihaknya merumuskan *mixed use* terminal ini dengan tiga fungsi di dalamnya.

“Pertama, fungsi utamanya adalah terminal itu sendiri sebagai Hub. Kedua, fungsi ekonomi atau komersial. Dan ketiga, fungsi layanan masyarakat. Untuk

fungsi yang terakhir adalah kami akan memberikan *space* bagi Pemerintah Daerah untuk membuka layanan perpanjang perizinan kepada warganya. Seperti Samsat, Dukcapil, dan lainnya,” katanya.

Popik juga menjelaskan terminal yang pertama menggunakan konsep tersebut adalah Terminal Dhaksinarga Gunung Kidul, Yogyakarta. Dengan penerapan konsep *mixed use* terminal yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah maka ekosistem menjadi tumbuh dan perekonomian mulai bergerak. Hal ini terbukti adanya toko UMKM dan kafe yang buka di sana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang.

Selanjutnya, tambahnya, adalah Terminal Mangkang di Semarang. Jika dilihat terminal ini cukup jauh dari pusat kota, sekitar 17 Km. Tidak ingin bangun ini terbengkalai dan menjadi sisa-sisa maka konsep *mixed use* terminal inipun diterapkan, dengan dukungan dari Pemerintah Kota Semarang yang akan membuka 30 pelayanan publik di Terminal Tipe A maka perekonomian di terminal tersebut mulai tumbuh.

“Dari data yang ada Terminal Mangkang yang awalnya tidak disinggahi oleh bus maka saat ini sudah 380 bus PO yang menaikkan dan menurunkan penumpang, dengan rata-

rata satu bus membawa 10 penumpang. Itu sudah luar biasa. Ini semua berkat perjuangan dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah X dan Kepala Terminal Mangkang yang secara berkala membuat kegiatan di terminal tersebut,” kata Popik.

Dan yang terakhir, dijelaskan Popik adalah Terminal telah berhasil menggunakan konsep *mixed use* adalah terminal Tirtonadi, Solo. Dimana, ketiga fungsinya yang dicanangkan telah berhasil dilakukan. Bahkan pada event Asean Para Games 2022 dengan cabang Yudo dilakukan di terminal tersebut dan yang terakhir adalah konser musik God Bless yang diselenggarakan Convention Hall Terminal Tirtonadi yang dihadiri oleh 500 orang penonton.

“Bahkan hingga Desember mendatang Convention Hall telah padat dengan beragam acara dan kegiatan setiap weekend dan weekdaysnya,” katanya.

Kegiatan Pendidikan Dijelaskan Popik bahwa penerapan konsep *mixed use* terminal ini tidak hanya untuk penyelenggaraan kegiatan hiburan semata. Di beberapa daerah ini juga dikerjasamakan untuk kegiatan pendidikan dan sosial. Seperti di Terminal Anak Air Padang. Untuk mengoptimalkan terminal ini maka Dinas Pendidikan kota Padang membuka kantor di terminal tersebut untuk memberikan layanan. Dan Universitas Andalas yang akan membuka Rumah Sakit.

“Selain itu, ada Terminal Gambut Barakat di Banjar Kalimantan Selatan yang saat ini mengalami peningkatan jumlah bus dan penumpang setelah dikerjasamakan dengan Universitas Islam Kalimantan (Uniska) yang membuka kampus di terminal tersebut,” tutupnya.\*



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Operasional Barang Milik Negara Pada Pelabuhan Ajibata dan Pelabuhan Ambarita di KSPN Danau Toba, Sumatera Utara, 15/8/2022. Foto: HMS DJPD/MAD

## DITJEN HUBDAT - PT.ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) SEPAKATI KERJA SAMA PEMANFAATAN PELABUHAN AJIBATA DAN AMBARITA

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) menandatangani perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Operasional Barang Milik Negara (KSPO BMN) Pelabuhan Ajibata dan Pelabuhan Ambarita yang terletak di Kawasan Danau Toba pada Senin (15/08) di Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Marta Hardisarwono menyatakan bahwa, "Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja dengan baik dalam proses persiapan sampai pelaksanaan Penandatanganan Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada hari ini," katanya.

Marta menambahkan bahwa saat ini pemerintah terus mendorong pengoptimalan Barang Milik Negara (BMN), hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui skema pembiayaan KPBU maupun KSP pada BMN kepada pihak lain.

"Di samping itu pengelolaan Pelabuhan Ajibata dan Pelabuhan Ambarita termasuk pemanfaatan fasilitas utama dan penunjang yang ada diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, dan mendorong partisipasi masyarakat maupun pihak lain ikut serta melalui skema kerja sama dengan pihak pengelola dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah," ujar Marta.

Ia berharap pada semua pihak yang terlibat kerja sama agar mematuhi aturan-aturan yang ada dan bersama-sama saling menjaga kualitas pelayanan dan kebersihan fasilitas.

"Saya juga berharap bahwa skema perjanjian kerja sama ini akan menjadi role model pemanfaatan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan," jelas Marta.

Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeber-



Pelabuhan Penyeberangan Ajibata Danau Toba, Sumatera Utara.

berangan (TSDP) Junaidi dalam laporannya menyatakan bahwa obyek BMN yang akan dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan Operasional (KSPO) berupa lahan dan bangunan di Pelabuhan Ajibata serta bangunan di Pelabuhan Ambarita.

"Proses Pemilihan Mitra KSPO ini dilaksanakan dengan mekanisme penunjukan langsung kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengingat objek pemanfaatan dalam bentuk KSPO tersebut merupakan BMN yang bersifat khusus. Jangka waktu pemanfaatan yaitu selama 25 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang," ujar Junaidi.

Kontribusi yang diberikan kepada negara berupa kontribusi tetap tahun pertama minimal sebesar Rp73.963.814 dengan kenaikan sebesar 1,78% per tahun, yang dibayarkan setiap tahun oleh mitra KSPO hingga akhir jangka waktu pemanfaatan sesuai perjanjian. Selain itu ada sistem pembagian keuntungan KSPO minimal sebesar 70,67% dari Laba Bersih. Pembagian keuntungan tersebut dilakukan apabila pemanfaatan BMN menghasilkan keuntungan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Dalam penandatanganan tersebut, PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) diwakili oleh Direktur Perencanaan dan Pengembangan, Harry Mac.

Turut hadir dalam kegiatan ini yaitu Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Popik Montanasyah dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, Batara.\*

## LALU LINTAS

## SOSIALISASI ANDALALIN DAN PENGAWASAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI MAKASSAR



Terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas dan Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perhubungan Darat di Swiss-Belhotel Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis (7/7/2022).

"Dalam Permenhub Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas terdapat substansi baru sesuai amanat dari Peraturan

Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu andalalin pada pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu tinggi, sedang, rendah, selanjutnya mekanisme integrasi andalalin dengan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), kompetensi penyusun andalalin, serta pengawasan dan sanksi dalam penyelenggaraan andalalin," ujar Marta Hardisarwono secara virtual selaku Sekretaris Jenderal Perhubungan Darat saat membacakan sambutan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Lebih lanjut Marta mengatakan, "Terdapat juga substansi baru pada Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, yaitu mengakomodir perkembangan teknologi pada penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor berupa penggunaan alat penimbangan kendaraan bermotor dengan alat penimbangan yang

manfaat Aset, dan dengan Pelnit tentang Kemitraan Strategis dan Sinergitas BUMN yang disaksikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Jumat (8/7).

"Ini merupakan sinergi yang baik dari tiga BUMN. Dimana ketiganya memiliki mandat yang tidak ringan, untuk melayani baik penumpang maupun barang ke pulau-pulau sampai ke pelosok wilayah Indonesia," ujar Menhub.

Menhub berharap melalui kolaborasi ini, pergerakan penumpang maupun barang dapat semakin efisien dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. "Kita ingin ada kegiatan end to end yang baik. Pelnit memiliki rute kapal sampai ke Papua, nanti ASDP yang meneruskannya sampai ke titik akhir. Kemudian, Pelindo memiliki pelabuhan yang memberikan dukungan kepada Pelnit dan ASDP. Kita ingin semua kegiatan supply chain ini berjalan dengan baik," tutur Menhub.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspawati mengatakan pihaknya mengapresiasi adanya kerja sama dan sinergi BUMN antara Pelindo

dapat dipindahkan, dibukanya kesempatan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor pada lokasi-lokasi lain seperti kawasan sentra produksi dan terminal barang, dan dibukanya kesempatan kerjasama dengan BUMN, BUMD, dan swasta."

Menurut PP 32 Tahun 2011 andalalin merupakan serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

Andalalin merupakan salah satu persetujuan teknis yang diamanatkan pada UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan untuk mempermudah perizinan yang mana terintegrasi dengan AMDAL atau UKL-UPL.

Menurut Plt. Kepala Seksi Andalalin, Dini Kusumahati, terdapat 3 (tiga) kriteria andalalin, yakni kriteria bangkitan rendah hanya membutuhkan persyaratan administrasi, lalu bangkitan sedang hanya cukup membuat rekomendasi teknis yang nantinya akan ditetapkan menjadi rekomendasi andalalin, dan yang terakhir bangkitan tinggi yakni terdiri dari infrastruktur atau kawasan besar.\*

dan Pelnit yang didukung penuh oleh Kementerian Perhubungan khususnya dalam mewujudkan percepatan konektivitas transportasi yang lancar, andal, aman dan selamat.

Selain dengan Pelindo, ASDP juga menjalin kerja sama dengan PT Pelnit yang mencakup penjualan tiket kapal, penggunaan *space dock* galangan, kerja sama pemanfaatan *learning center* sebagai penunjang pendidikan dan latihan, serta kerja sama terkait potensi bisnis yang dapat memperkuat dan menguntungkan kedua belah pihak.

Direktur Utama PT Pelnit Tri Andayani menyambut baik kerjasama antara PT Pelnit dengan PT ASDP. Menurutnya dengan adanya kerjasama kedua belah pihak ini nantinya akan semakin mempermudah masyarakat pengguna angkutan laut.

"Dengan kerjasama Pelnit - ASDP dalam hal *ticketing* dan konektivitas trayek kapal, diharapkan mempermudah pengguna jasa berpindah dari satu Pelabuhan ke pelabuhan lain dengan satu aplikasi yang terintegrasi," ungkap Andayani.\*

SARANA

### KEMENHUB TANGGAPI KECELAKAAN TRUK BBM DI CIBUBUR



Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengucapkan belasungkawa atas terjadinya musibah kecelakaan yang melibatkan truk pengangkut bahan bakar minyak (BBM) di Jalan Alternatif Cibubur Transyogi. Truk BBM tersebut menabrak 2 unit kendaraan roda empat dan 10 kendaraan roda dua pada Senin (18/07) lalu dan mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka.

“Kami dari D Perhubungan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Angkutan Barang Berbahaya di Jalan, dinyatakan bahwa sejumlah kompetensi perlu dimiliki awak Angkutan Barang Berbahaya,” ungkap Hendro.

Selain itu, dalam mengoperasikan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut barang berbahaya harus sesuai dengan jenis dan karakteristik barang berbahaya yang diangkut. Hal tersebut sesuai Permenhub 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan. Dalam PM 60/2019 tertulis juga bahwa angkutan barang berbahaya harus digunakan sesuai peruntukannya dan wajib beroperasi sesuai lintasan yang telah ditetapkan.

“Selain kedua regulasi PM 77/2021 dan PM 60/2019 tersebut, kami di Kemenhub memiliki sejumlah regulasi terkait pengoperasian kendaraan barang seperti PM 33 tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dan

PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Sehingga ke depannya diharapkan kita dapat mencegah kejadian serupa dengan memperketat pengawasan dan tugas masing-masing baik dari sisi pemerintah, pemilik usaha, perusahaan, sampai pengemudi angkutan barang itu sendiri,” jabar Hendro.



Hendro menyampaikan bahwa pihaknya mendorong setiap perusahaan maupun pemilik angkutan barang berbahaya untuk melakukan inspeksi sebelum keberangkatan dan disarankan untuk rutin memeriksa kelaikan kendaraan secara berkala.\*

Sementara pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menyampaikan bahwa, “Perlu ada SPBU *Mobile* atau tangki karena saat ini sudah tidak boleh pakai jerigen. Selain itu di lantai atas merupakan daerah komersial, perlu diperhatikan karena di sini pelabuhan sehingga orang tidak berlama-lama jadi kalau bisa jualannya tidak sama semua,” ujarnya.



Dalam kunjungan ini, turut hadir Staf Khusus Menhub Bidang SDM dan Kehumasan Adita Irawati, Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP) Junaidi, Direktur Lalu Lintas Jalan Cucu Mulyana, Direktur Angkutan Jalan Suharto, Direktur Sarana Transportasi Jalan Danto Restyawan, dan Tenaga Ahli Menhub Bidang Komunikasi Media Massa Thontowi.\*

TSDP

### TINJAU KESIAPAN OPERASIONAL PELABUHAN DI BALI, DIRJEN HUBDAT SANGANGI BIAS MUNJUL DAN SAMPALAN



Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiarno melakukan peninjauan operasional ke 2 Pelabuhan Penyeberangan di Bali yaitu Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul dan Pelabuhan Penyeberangan Sampalan Nusa Penida pada Kamis (28/07) kemarin. Saat ini progres Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul dalam realisasi pembangunannya telah mencapai 84%.

Selanjutnya, Dirjen Hubdat dan rombongan mengunjungi Pelabuhan Penyeberangan Sampalan di Nusa Penida. Dalam kunjungannya tersebut, Hendro berharap dengan kehadiran pelabuhan dan dermaga yang dibangun dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

“Saya juga datang ke Pelabuhan Sampalan dan didampingi Bupati Klungkung. Saya ingin memastikan pembangunan ini berjalan dengan baik. Saya kira pembangunan ini juga bagus dan luar biasa,” jelas Hendro dengan didampingi oleh Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta.

Dalam kunjungan itu, Dirjen Hubdat juga mengundang sejumlah pakar transportasi untuk dapat memberi masukan mengenai operasional dan kondisi fasilitas yang tersedia di kedua pelabuhan tersebut. Salah satu masukan yang diterima berasal dari pengamat transportasi, Darmaningtyas.

“Soal fasilitas toilet, tadi disampaikan bahwa toilet harus ada yang jongkok dan duduk. Untuk layanan publik harus ada toilet jongkok dan duduk, fasilitas disabilitas, ruang laktasi. Untuk di tempat ramai bisa juga ada tempat bermain anak, tapi karena ini pelabuhan tidak perlu ada tapi kalau ada ya lebih baik lagi,” urai Darmaningtyas.

LALU LINTAS

### DITJEN HUBDAT- POLDA BALI KOORDINASIKAN PERSIAPAN JELANG KTT G 20



Untuk mempersiapkan KTT G20 yang akan digelar di Bali pada 15-16 November 2022 mendatang, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan rapat koordinasi dengan Polda Bali. Berlokasi di Polda Bali, Denpasar pada Jumat (29/07), Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiarno beserta jajaran membahas sejumlah hal seperti manajemen rekayasa lalu lintas dan juga kendaraan listrik yang akan digunakan melayani delegasi KTT G20.

“Kita mau melihat bagaimana konsep kita dalam melaksanakan pengamanan dan rekayasa lalu lintas. Saya ingin mensinkronkan upaya kita menjalankan G20 berkaitan dengan transportasi dan rekayasa lalu lintas. Pada dasarnya kami sudah siap tinggal mengoordinasikan dan kami juga butuh koordinasi terkait pelaksanaan TFG (*Tactical Floor Game*). Kami menyiapkan 30 bus listrik yang akan melayani 4 koridor untuk pelayanan bus listrik mulai dari bandara sampai ke Nusa Dua, dan ada beberapa lagi untuk mendukung pelaksanaan G20,” jelas Hendro.

Hendro berharap semua pekerjaan maupun pelaksanaan kesiapan G20 dapat dilakukan bersama-sama. “Tentu harapan kami tidak ada yang dapat kami kerjakan sendiri, semuanya secara koordinatif untuk mensukseskan kegiatan G20. Kemarin saya sudah bicara dengan Gubernur Bali terkait kegiatan ini dan beliau merespon dengan baik. Kemarin Bapak Menkomarves diinfokan akan mulai TFG sekitar September 2022 dan nanti akan kita lihat dapat di-support di mana,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Bali, Irjen. Pol. Putu Jayan Danu Putra, menyatakan bahwa pihaknya juga akan menggelar operasi Puri Agung 2022 dan mengerahkan kurang lebih 6.744 personel.\*

SARANA

### SAMBUT PESERTA JAMNAS XI 2022, DITJEN HUBDAT SOSIALISASIKAN KESELAMATAN JALAN DI KALANGAN PELAJAR



Ditjen Perhubungan Darat memberikan edukasi seputar Keselamatan Jalan kepada 100 orang anggota Pramuka peserta Jambore Nasional (Jamnas) XI 2022. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh mewakili Dirjen Perhubungan Darat pada Kamis (18/08) menyampaikan 2 sikap yang harus diterapkan peserta dalam kehidupan sehari-hari yaitu disiplin dan menghargai waktu.

“Disiplin dalam segala hal, penting untuk diterapkan. Baik disiplin waktu dan juga ada waktu bermain, ada waktu untuk belajar. Selain itu perlu juga untuk menghargai waktu. Waktu itu mahal, tidak bisa dibeli. Kalau tidak dapat menghargai waktu maka tidak dapat menghargai orang,” demikian disampaikan Amirulloh di depan peserta dengan rentang usia 11-15 tahun.

PRASARANA

### KUNJUNGAN KERJA DIRJEN HUBDAT KE YOGYAKARTA



Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiarno melakukan peninjauan ke sejumlah prasarana transportasi jalan di Yogyakarta, 26/8/2022. Prasarana transportasi jalan yang pertama dikunjungi oleh Dirjen Hendro dalam lawatannya ke Yogyakarta adalah UPPKB (Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor) Kulwaru di Kulon Progo. UPPKB Kulwaru terletak tidak jauh dari YIA (Yogyakarta In-

Sementara Kasubdit Manajemen Keselamatan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Heri Prabowo memaparkan tentang “Edukasi Keselamatan Jalan”. Heri menjelaskan bahwa untuk mengetahui keselamatan jalan, maka harus mengetahui konsep keselamatan dan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

“Keselamatan merupakan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/ atau lingkungan. Sementara kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau tanpa melibatkan pengguna jalan lain yang menyebabkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda,” kata Heri.

Profil korban kecelakaan di Indonesia Tahun 2021 berdasarkan usia paling banyak pada rentang usia muda 20-29 tahun. Ada beberapa penyebab kecelakaan yang sering terjadi antara lain: sarana atau kendaraannya, prasarana, manusia, dan faktor lingkungan/alam. Selain itu, untuk meningkatkan keselamatan jalan di kalangan pelajar, Ditjen Hubdat telah mengadakan program keselamatan bagi pelajar dengan menyediakan rute aman selamat sekolah (RASS), penyediaan bus sekolah, penyediaan zona selamat sekolah, kebijakan larangan penggunaan kendaraan bermotor, dan program *bike to school*.\*

ternational Airport). UPPKB atau sering disebut Jembatan Timbang ini merupakan salah satu UPPKB yang menjadi *pilot project* penerapan teknologi WIM (*Weigh In Motion*).

Usai meninjau UPPKB Kulwaru, Dirjen Hendro bersama jajaran bergerak menuju wilayah selatan Yogyakarta yaitu Gunung Kidul. Prasarana kedua yang dikunjungi oleh Dirjen Hendro adalah Terminal Tipe A Dhaksinarga, Wonosari, Gunung Kidul. Sejak akhir tahun 2020, sebagian gedung Terminal yang ada di lantai 2 digunakan sebagai MPP (Mal Pelayanan Publik) Pemkab Gunung Kidul. Sementara fungsi Terminal sebagai simpul transportasi publik juga tetap berjalan.

Pada hari yang sama, Dirjen Hendro juga menyempatkan diri meninjau Terminal Tipe A Giwangan Yogyakarta. Di tempat ini, Dirjen Hendro memantau persiapan proyek revitalisasi Terminal Tipe A Giwangan Yogyakarta.\*

Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan gigi dan mulut membuat tugas para dokter gigi menjadi lebih tertantang untuk mengatasinya.

Berikut adalah kisah pengabdian profesi dokter gigi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Perhubungan.

Drg. Era Parningotan Sianipar adalah seorang dokter gigi di Klinik Pratama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

**Apa yang membuat Anda tertarik untuk menjadi ASN?**

Rasa sangat cinta kepada NKRI adalah alasan utama saya. Dimana Salah satu bentuk tindakan nyata tersebut diwujudkan dengan menjadi seorang ASN. Sebelum menjadi ASN di Kemenhub, saya pernah menjadi dokter gigi pegawai tidak tetap (PTT). Berbagai daerah telah menjadi tempat saya berkarya di masyarakat. Saya pernah di Puskesmas pedalaman Jambi dan Kalimantan yang tidak dialiri listrik dan air bersih. Jadi kehidupan sehari-hari menggunakan air hujan. Dengan menyandang status pegawai tidak tetap, membuat saya tidak maksimal berkarya untuk masyarakat. Kini dengan menjadi dokter gigi berstatus ASN, ide-ide untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat diimplementasikan.

**Pada 9 September 2022 lalu, Klinik Pratama Ditjen Hubdat diresmikan oleh Bapak Sesditjen. Bagaimana ide Anda selanjutnya?**

Ide saya selanjutnya adalah bagaimana agar Klinik kita ini dapat menjadi BLU dan pelayanannya dapat di rasakan masyarakat luas. Mengingat adanya BPTD di daerah, maka perlu ada semacam pos kesehatan di wilayah BPTD, mungkin dapat di tempatkan di Terminal atau di tempat strategis tertentu. Perlunya kegiatan penyuluhan kesehatan



Sesditjen Perhubungan Darat Amirulloh, Kabag SDM dan Umum Dadan M. Ramdan, berfoto bersama para dokter dan pegawai Klinik Pratama Ditjen Perhubungan Darat usai peresmian, 9/9/2022. Drg. Era, berdiri di belakang tengah memakai rompi. Foto: HMS DJPD/BYU

KESEHATAN

## KISAH PENGABDIAN PROFESI DOKTER GIGI ASN DITJEN HUBDAT

umum dan gigi yang rutin mencakup seluruh pegawai dan sekaligus kegiatan medical check up (MCU), termasuk pemeriksaan gigi dan mulut.

**Seberapa penting kesehatan gigi dan mulut itu dan apakah ada ide kegiatan kedokteran gigi yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pegawai kita?**

Survey kesehatan tahun 1998, sekitar 62,4% penduduk merasa terganggu pekerjaannya/ sekolahnya karena sakit gigi. Dari survey tersebut juga diketahui 3,86 hari kerja/orang/tahun. Sehingga kerugian akibat sakit gigi adalah Rp. 652.655.085,-/ tahun. Hal ini tidak jauh berbeda dengan hasil Riskesdas 2018 yang menyebutkan bahwa ada sebanyak 57 % penduduk Indonesia yang memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut. Dan hanya 10% saja yang memperoleh perawatan dari dokter gigi. Angka-angka ini mencerminkan bahwa kesehatan

gigi dan mulut penting untuk ditingkatkan di Indonesia.

Ide saya dalam hal bidang kedokteran gigi antara lain rutin melakukan konsinyering untuk penyuluhan kesehatan gigi dan mulut, pembuatan gigi palsu, pembuatan veneer, pembuatan rekam medik elektronik, pelatihan dokter gigi di luar negeri, lomba gigi sehat antara pegawai, lomba gigi sehat antara anak pegawai, pembuatan odontogram pegawai, edukasi kesehatan gigi dan mulut pada setiap kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dll.

Jika beberapa ide tersebut diatas dapat terwujud, maka derajat kesehatan gigi dan mulut pegawai kita dapat meningkat. Contoh kecil saja, jika seluruh pegawai ketika tersenyum dengan penampakan gigi yang indah, tentu akan tercipta kondisi kerja yang harmonis sehingga didapatkan hasil kerja yang berkualitas tinggi. (\*)

**Sebelum menjadi ASN Kemenhub, saya menjadi dokter gigi pegawai tidak tetap. Saya pernah bertugas di Puskesmas pedalaman Jambi dan Kalimantan yang tidak dialiri listrik dan air bersih. Jadi kehidupan sehari-hari menggunakan air hujan.**



Kunjungan Dirjen Hubdat Hendro Sugiatno ke PT INKA Madiun untuk meninjau progres pembangunan bus listrik G20, 11/7/2022. Foto: HMS DJPD/BYU



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Joint Project for EV Ecosystem: EV Smart Mobility, Nusa Dua, Bali, 27/7/2022. Foto : HMS DJPD/BYU



▶ Dirjen Hubdat Hendro Sugiatno bersama jajaran meninjau Pelabuhan Penyeberangan Sampalan dan Bias Munjul, Bali, 28/7/2022. Foto : HMS DJPD/BYU



▲ Serah terima jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kantor Pusat Kemenhub Jakarta, 16/8/2022. Foto: HMS DJPD/WBW & BYU



▲▲ Atas: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjadi inspektur upacara pada Upacara Peringatan HUT RI ke 77 di Halaman Kantor Pusat Kemenhub Jakarta, 17/8/2022. Dari kiri ke kanan: Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan, Junaidi; Dirjen Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno; Direktur Angkutan Jalan, Suharto; Sesditjen Perhubungan Darat, Amirulloh. Foto: HMS DJPD/BYU



▲ Direktur Lalu Lintas Jalan Cucu Mulyana dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang LLAJ di Bandung, 24/8/2022. Foto: HMS DJPD/BYU



◀ Menhub Budi Karya Sumadi, Menko Polhukam Mahfud MD, Menlu Retno Marsudi, dan Rektor UGM Ova Emilia dalam Road Safety Campaign di Yogyakarta, 27/8/2022. Foto: HMS DJPD/CAS



◀ Forum Group Discussion Sistem E-Ticketing Berbasis Akun Untuk Mendukung Integrasi Pembayaran Antar Moda dan Sosialisasi Sistem Pembayaran BRT di Palembang, 27/8/2022. Foto: HMS DJPD/MAD

► Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional Tahun 2022, Jakarta, 15/9/2022. Foto: HMS DJPD/WBW



► Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional di Palembang, 17/9/2022. Foto: HMS DJPD/BYU



► Direktorat Jenderal Perhubungan Darat meraih Juara I Lomba Volley Ball yang digelar dalam rangka Hari Perhubungan Nasional 2022, penyerahan piala dilaksanakan pada Malam Kesenian Harhubnas 2022 di Palembang, 17/9/2022. Foto: HMS DJPD/BYU

